

**PELECEHAN DAN KESEWENANG-WENANGAN  
BERBAHASA PLESETAN DALAM KAJIAN  
BAHASA DAN POLITIK DI INDONESIA**

Ariel Heryanto

*Air love you ... Love you sebelum berkembang ...  
Umar Kayam? Kayam goreng  
Ayam goreng to school. Goreng Petruk Bagong ...  
(Yogyakarta 1991)*

Plesetan merupakan kegiatan berbahasa yang memanfaatkan sifat sewenang-wenang pada kaitan di antara kata-kata dan realitas dunia yang diacunya. Kesewenang-wenangan itu sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan. Ia menjadi bagian dari hakikat bahasa yang paling mendasar dan universal di seluruh muka bumi. Ia bukan sekadar penyelewengan yang terjadi sesekali, karena iSeng, atau khas digemari orang Jawa. Oleh karena itu, plesetan sebenarnya praktek berbahasa yang jauh lebih normal dan lazim daripada yang selama ini diakui orang. Yang mencurigakan ialah bahwa kenyataan yang seolah-olah sangat sederhana ini tidak mendapatkan pengakuan sewajarnya dalam masyarakat pada umumnya dan kalangan ahli bahasa pada khususnya.

**Yang Penting, Yang Terabaikan**

Kesewenang-wenangan yang menjadi sifat kaitan di antara kata-kata dan realitas di luarnya merupakan temuan Bapak Strukturalisme Eropa, Ferdinand de Saussure, pada dekade awal abad ke-20. Temuan itu ternyata menjadi salah satu tonggak terpenting dalam seluruh ilmu-ilmu sosial dan humaniora sepanjang abad ini. Dalam bahasa yang lebih baku di kalangan kaum strukturalis, hal itu digambarkan sebagai tidak adanya kaitan yang langsung, logis atau alamiah di antara tiga hal ini: penanda (*signifier*) -- maknanya (*signified*) -- dan realitas di dunia yang diacunya (*referent*), kecuali kaitan yang diada-adakan dan sewenang-wenang (*arbitrary*).

Tidak ada hukumnya mengapa kursi disebut *kursi*. Atau, hukum disebut *hukum* dan bahasa dikatakan *bahasa*. Beberapa kata yang penting di Indonesia pada zaman ini seperti *komunis*, *pribumi*, *Pancasila*, atau *Pembangunan* tidak secara langsung, objektif, logis atau alamiah harus mempunyai makna tertentu, apalagi menunjuk pada orang atau benda konkret tertentu di dunia ini. Biar pun

sudah banyak kita dengar sejak pertama kali belajar seluk beluk bahasa, hal tersebut masih terasa perlu dikemukakan kembali di sini karena beberapa alasan berikut.

Pertama, sebagian besar gejala sejarah umat manusia dibangun dengan menyangkal kesewenang-wenangan kaitan penanda-makna-realitas. Fanatisme, kecemburuan, kebencian, kemarahan, dan perang terjadi berkat atau demi tercapainya penyangkalan itu. Beberapa contoh istilah kunci pada alinea di atas sengaja dipilih untuk mengajak kita merenung betapa dahsyat dampaknya apabila orang terbuai sehingga percaya bahwa seakan-akan ada kaitan yang langsung, tegas, dan jelas di antara realitas dunia (termasuk peristiwa, pikiran, dan tindakan seseorang) dengan istilah-istilah tersebut. Sebaliknya, betapa banyak orang lain telah dipahlawankan, diberi kuasa dan kewibawaan berkat ketakhyulan yang sama atau mirip. Hanya dengan adanya kepercayaan itu, yang lama-lama dikukuhkan sekuat fosil atau monumen, pemaknaan yang berbeda dari yang sudah terlanjur lazim atau dibakukan akan dianggap kekhilafan, pelecehan, pemalsuan, atau plesetan.

Kedua, sehubungan dengan yang pertama, plesetan hampir selalu disepelekan. Mungkin ia sesekali dihargai karena lucu dan menghibur, tetapi biasanya dianggap sebagai lelucon dan hiburan orang iseng. Maka plesetan tidak pernah mendapatkan cukup perhatian dalam agenda penelitian serius. Di antara sedikit orang yang berusaha menelitinya dengan lebih serius, plesetan diperlakukan pertama-tama sebagai kebudayaan pop dan/atau sebagai praktek budaya yang khas Jawa. Apa implikasinya?

Dianggap sebagai contoh praktek budaya pop, plesetan mungkin dihargai, tetapi tetap dengan sikap defensif, protektif, berbelas-kasihan, atau romantik. Artinya, pada dasarnya plesetan dianggap sebagai penyimpangan atau semipalan dari budaya/bahasa yang "normal". Ketidak-normalannya boleh jadi dianggap sebagai hal terpuji atau istimewa, atau sebagai celaan/cacat. Sebagai budaya/bahasa yang dianggap khas Jawa, plesetan diteliti dalam kaitan dengan hal-hal non-bahasa yang juga dianggap menjadi khas dalam masyarakat Jawa, misalnya sikap non-konfrontatif, tidak berterus-terang, suka humor, menjaga harmoni, dan sebagainya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Budi Susanto dengan jitu berpendapat bahwa persoalan "agen" (siapa yang membuat pernyataan) tidak seharusnya ditekankan dalam memahami plesetan (1992:62). Katanya lebih tegas, plesetan itu mungkin terjadi karena hakikat bahasa itu sendiri" (1992:63). Maka ini berarti bahwa tidak penting siapa yang berplesetan, apakah itu orang Jawa atau bukan. Namun, sayang bahwa pokok terpenting ini justru tidak diberi penjelasan atau argumen lebih jauh oleh Budi Santoso. Pokok itu hanya muncul selintas dalam acara tanya jawab, bukan

Ketiga, tidak dapat dibantah lagi perdebatan paling penting dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial dan humaniora secara global pada dua dekade belakangan disulut oleh wawasan post-strukturalisme dan dekonstruksi. Sedikit banyak perdebatan ini sudah merambah kalangan intelektual Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini perlu dikemukakan di sini, sebab perdebatan itu berkaitan dengan sejarah kajian bahasa namun tidak mendapatkan perhatian selayaknya dari ilmuwan bahasa kita sendiri.

Perdebatan post-strukturalisme dan dekonstruksi beranjak dari pengkajian yang sangat radikal dan kritis terhadap seluk-beluk bahasa, khususnya kesewenang-wenangan bahasa dan ketergantungan makna pada adanya negasi, oposisi, atau perbedaan di antara tanda. Anehnya, jarang sekali linguist di Indonesia dan mungkin beberapa negeri lain, yang tanggap terhadap perdebatan yang telah merombak sosok ilmu-ilmu sosial di paruh terakhir abad ke-20 ini. Perdebatan itu lebih banyak diikuti oleh para filosof, ilmuwan politik dan sosial, sejarawan, serta kritikus budaya dan sastra. Semua ini memberikan kesan seakan-akan linguistik merupakan sebuah dunia sempit, terpencil, dan terasing dari masyarakat zamannya, dikuasai sisa-sisa pemikiran dari abad lampau yang terpukau oleh cara kerja ilmuwan pasti dan alam dan berusaha menjiplak cara kerja disiplin itu ke dalam kajian bahasa. Seakan-akan berbagai gejala sosial di masyarakat Orde Baru bukanlah urusan para ahli bahasa kita, selama itu tidak langsung bersangkut-paut dengan seluk-beluk kata atau kalimat yang dipakai warga negara Indonesia.

Ada baiknya diingat bahwa sejak di masa hidup Sokrates di Eropa, atau pujangga-pujangga kerajaan di Asia, hingga awal abad ini para cendekiawan yang menggulati seluk-beluk bahasa tidak pernah memperlakukan bahasa terlepas dari masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan. Bukan hanya pada aras teori atau intelektual, tetapi juga praktek. Tidak sedikit di antara mereka yang mempertaruhkan risiko berat sebagai akibat penelitian dan karya-karya tulisnya dalam seluk-beluk bahasa. Di Eropa untuk abad ini risiko semacam itu

bagian dari makalah yang disampaikan dalam Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya Kelima. Ironisnya pula makalahnya sendiri membahas hal-hal yang seakan-akan khas Jawa. Pembahasan plesetan seakan-akan sebagai sesuatu yang unik Jawa juga dapat dijumpai pada ulasan Christianito P. Rahardjo (1996).

<sup>2</sup> Lihat kumpulan tulisan oleh orang-orang Indonesia tentang post-modernisme dan post-strukturalisme yang dihimpun Suyoto dkk. (1994). Perlu diakui pula bahwa wawasan tersebut telah membantu penulis untuk menyusun tulisan ini.

dialami kaum Formalis Rusia, kelompok Bakhtin di Leningrad, atau kaum strukturalis di Praha. Di bawah nanti akan dicoba dibahas lebih jauh mengapa kajian bahasa tidak dapat dilepaskan dari kajian sosial.

Di Indonesia sendiri hingga pada hari ini tidak sedikit orang yang ditangkap, diadili, dipenjara karena kreativitas dan petualangannya menjelajahi kemungkinan berbahasa. Setahu saya tidak seorang pun ahli bahasa Indonesia yang secara serius ikut terlibat dalam persoalan ini. Berbagai persoalan kemasyarakatan yang serius di tanah air saat ini dianggap berada di luar bidang kebahasaan. Mungkin itu sebabnya pula hampir semua badan politik di negeri ini juga meremehkan bahasa, tidak lebih daripada sekadar alat komunikasi yang bisa diapakan saja sesuai dengan kebutuhan dan kemauan pemakainya. Bahkan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) almarhum yang meyakini pentingnya kebudayaan dalam mewujudkan semboyan "Politik adalah Panglima" juga tidak lebih menghargai bahasa dibandingkan para lawannya. Padahal, mereka dapat menghargai sastra, dan berbagai cabang kebudayaan lainnya sebagai suatu kekuatan sosial yang serius.

Keempat, di Indonesia saat ini perdebatan tentang post-strukturalisme dan post-modernisme kadang-kadang dicurigai atau ditampik dengan alasan bahwa semua itu tidak relevan untuk Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang masih baru berkembang. Perbincangan tentang post-strukturalisme dan post-modernisme dianggap sebagai kegenitan mode segelintir intelektual Indonesia yang terlalu ke-Barat-Baratan. Ironisnya justru pandangan yang meremehkan Indonesia dalam perspektif evolusi sosial itu tak kalah "Barat", khususnya Barat dari zaman kolonial.

Harus diakui bahwa tidak sedikit pembahasan tentang post-strukturalisme dan post-modernisme yang memadamkan minat orang awam untuk ikut mendengar. Hal ini disebabkan oleh padatnya jargon dan nama asing yang disampaikan dalam susunan rumit di balik sikap angkuh pembahasnya. Sedikit banyak hal ini mengundang sinisme orang. Namun, kalau kita jujur dan adil, harus diakui pula bahwa sinisme itu sering muncul sebagai akibat kekhilafan atau ketidak-kenalan banyak orang bahwa praktek dekonstruksi dan wawasan post-strukturalisme Perancis masih berkerabat dekat dengan plesetan. Ia menjadi bagian yang universal di muka bumi ini dengan sosok, watak, dan nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang cendekiawan Indonesia yang gemar post-strukturalisme untuk lebih banyak mengenal plesetan atau sejenisnya.

## Plesetan: Pokok-pokok Maknanya

Sejarah plesetan di masa lampau masih merupakan wilayah yang gelap, paling tidak bagi saya. Walaupun wilayah itu layak dikuak, saya tidak akan mencoba mengerjakan hal itu dalam tulisan ini. Sebagai usaha awal dan bertaraf "coba-coba", tulisan ini akan memusatkan perhatian pada gejala plesetan mutakhir, dan sejumlah pembahasan orang lain pada masa ini.

Pada awal tahun 1991 di Yogyakarta terjadi demam-plesetan, walaupun plesetan sudah dilombakan secara rutin di Universitas Gadjah Mada beberapa tahun sebelumnya (*Berita Nasional* 1991). Dari serangkaian peristiwa di kota dan tahun-tahun itulah uraian saya akan beranjak. Akibatnya, sedikit-banyak kajian ini akan kedengaran agak Jawa-sentris, tetapi ini tidak lebih dari sebuah titik-tolak dengan menggunakan sejumlah kasus. Di wilayah Yogyakarta pada awal dekade ini bukan saja produksi dan konsumsi plesetan melonjak, tetapi beberapa cendekiawan mulai serius mempertanyakan makna sosialnya.

Dalam harian lokal *Berita Nasional* kita jumpai sejumlah kolom opini tentang gejala plesetan dari sejumlah sudut-pandang. Pada tahun yang sama ketika diundang berbicara pada Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya yang kelima, Budi Susanto yang bermukim di Yogyakarta tidak dapat melepaskan bahasanya dari acuan tentang plesetan. Budi Susanto tidak secara khusus membahas plesetan dalam makalahnya. Jelas tidak dalam lingkup pengertian yang dipakai dalam uraian di sini. Namun, hampir seluruh acara tanya jawab dengan hadirin sesudah penyampaian makalahnya berpusat pada soal plesetan (Susanto 1992).

Di bawah nanti kita perlu mempertimbangkan secara lebih rinci beberapa pendapat dari pertukaran pandangan itu. Namun, sebelum itu ada baiknya diperjelas dahulu apa yang dimaksud dengan istilah "plesetan", beberapa ragamnya, serta contoh-contohnya. Sampai sekarang makna plesetan masih cukup merdeka, lolos dari penjajahan aparatus ilmu-ilmu sosial yang dinamakan definisi dan kamus. Istilah plesetan digunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian secara longgar. Ini tidak usah dianggap sebagai suatu kesalahan atau cacat yang perlu ditertibkan. Yang sekarang terjadi ialah bahwa berbagai pihak masih belum merasa perlu mempertegas kategorisasi aneka makna plesetan dan memperhitungkan implikasinya secara sosial. Apabila penegasan semacam itu kelak akan menjadi kebutuhan, pasti akan terjadi semacam adu pemaknaan atau definisi plesetan.

Untuk sementara kita catat saja berbagai pengertian yang masih hidup



merdeka dan mandiri itu. Plesetan jelas berasal dari akar-kata *p(e)leset*. Walaupun bahasa Indonesia merasa ikut memiliki akar-kata *peleset* dan beberapa kata bentukannya, istilah plesetan agaknya tidak diakui sebagai istilah resmi dalam bahasa nasional. Ia diterima sebagai kata-pinjaman dari bahasa Jawa. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia hanya dikenal makna-makna yang negatif pada berbagai istilah yang berakar dari *peleset*: gagal mencapai tujuan, tidak mengenai sasaran, atau terpelanting jatuh.<sup>3</sup> Plesetan yang dikenal dalam bahasa Jawa justru mengandung makna yang positif: meluncur di tempat licin untuk bersenang-senang, atau bermain-main dengan kata.<sup>4</sup>

Walaupun sudah memberikan pengertian yang tepat, kamus Horne (1974) belum memberikan penjelasan cukup kepada kita yang ingin memahami seluk-beluk plesetan. Untuk keperluan bahasan di sini plesetan dapat digambarkan sebagai kegiatan berbahasa yang mengutamakan atau memanfaatkan secara maksimal pembentukan berbagai pernyataan dan aneka makna yang dimungkinkan oleh sifat sewenang-wenang pada kaitan penanda-makna-realitas empirik. Pernyataan itu disusun dengan cara mengubah sebagian dari unsur pernyataan orang lain, biasanya yang sudah diterima sebagai sesuatu yang normal, wajar, nalar, atau benar. Namun, perlu diingat bahwa pernyataan orang lain yang dijadikan sasaran plesetan itu sendiri sebenarnya dibuat secara sewenang-wenang. Persis seperti pernyataan yang disebut plesetan. Pernyataan orang lain itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang secara objektif atau alamiah bersifat normal, wajar, nalar, dan benar. Itu sebabnya di satu pihak plesetan dapat dibilang bersifat universal. Tetapi di pihak lain, hanya sebagian saja dari praktek berbahasa yang kita sebut dan bahas sebagai plesetan. Yang dinamakan plesetan sebenarnya adalah "plesetan terhadap plesetan." Yang disebut plesetan itu masih dapat diplesetkan lagi.

Orang yang terpeleset di atas panggung atau kamar bisa mengundang tawa, asal jatuhnya tidak berakibat serius. Sebagian besar lelucon ditimbulkan oleh meleset atau terpelesetnya harapan penonton/pendengar suatu komunikasi yang diterima dari pihak lain. Harapan itu terbentuk oleh kelaziman atau pengalaman yang berulang-ulang. Harapan itu juga dirangsang oleh umpan awal yang diberikan orang yang sedang menyampaikan suatu pesan (bicara, menulis, bertindak). Seakan-akan ia sedang/akan menyampaikan atau bertindak sesuatu yang sudah lazim kita kenal. Akan tetapi, di tengah-tengah jalannya penyampaian

<sup>3</sup> Lihat, misalnya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988), yang diterbitkan oleh Balai Pustaka.

<sup>4</sup> Lihat dua pengertian yang ditawarkan kamus Horne (1974).

pesan itu tiba-tiba ada pembelokan, penyelewengan, kejutan, keterpatahan, atau kecelakaan yang tak diduga si penerima pesan.

Sebagai akibat dari pembelokan/ penyelewengan/ kejutan/ keterpatahan/ kecelakaan itu bisa timbul kelucuan, tetapi bukan tanpa risiko kemungkinan terjadinya kebingungan, kesalahpahaman, atau juga perasaan tersinggung. Seperti kebanyakan lelucon, agar berhasil plesetan membutuhkan (a) suatu kelaziman dalam logika, harapan, praktek, atau perangkaian tanda/makna yang dikenal baik oleh penerima pesan; (b) suatu penyelewengan sebagian dari unsur-unsur kelaziman itu; dan (c) kemampuan pihak yang disapa untuk mengenali, memahami, atau menghargai adanya penyelewengan yang disengaja itu.

### Variasi Plesetan dan Contohnya

Sejauh mana penyelewengan itu terjadi, dan dalam bentuk bagaimana dapat membedakan satu jenis plesetan dari jenisnya yang lain. Paling sedikit ada tiga kelompok besar jenis plesetan yang dapat dijumpai dari kemeriahan plesetan di Yogyakarta pada tahun 1991 itu, dan mungkin dalam lingkup yang lebih luas. Saya katakan "paling sedikit", karena saya yakin pasti ada banyak kemungkinan dan cara untuk membedakan jenis-jenis plesetan. Juga ada berbagai kemungkinan batas lingkup apa yang dapat dimasukkan sebagai plesetan dan apa yang tidak. Apa yang disajikan di sini pasti bukan satu-satunya cara perbedaan variasi plesetan. Juga saya katakan bahwa paling sedikit ada tiga "kelompok besar", karena masing-masing kelompok masih dapat dibedakan atas beberapa sub-kelompok lebih kecil.

Pertama, ada plesetan yang hanya "menjegal" suatu rangkaian tanda (penanda dan makna) yang sudah lazim, tanpa diikuti pembentukan suatu susunan pesan baru yang dari sudut kebahasaan terpadu secara formal. Dengan kata lain, ini adalah jenis plesetan untuk berplesetan itu sendiri. Di sini bukannya tidak terjadi komunikasi. Kalau tidak terjadi komunikasi maka juga tidak ada yang lucu dan tidak ada yang tertawa. Yang terjadi adalah kenikmatan bermain-main bahasa di dalam bahasa itu sendiri tanpa mempedulikan kaitannya dengan dunia di luar bahasa. Contohnya, pernyataan "air love you ... love you sebelum berkembang ... Umar Kayam? Kayam goreng. Ayam goreng to school. Goreng Petruk Bagong ...."<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Contoh-contoh ini saya ambil dari tulisan Hairus Salim (1991) dan Emha Ainun Nadjib (1991).

Tidak ada kaitan yang lazim dan langsung antara "air" dan "love you". Juga di antara "love you" dan "sebelum berkembang", atau di antara "ayam goreng" dengan "to school". Akan tetapi, jika masing-masing digabung, orang bisa tertawa apabila mengenali adanya kaitan-kaitan yang tidak lazim atau tidak langsung di antara mereka. Apa artinya tidak langsung di sini? Atau, apa yang menjadi kaitan perantara itu? Pada kalimat pertama ada kaitan perantara yang menghubungkan "Air" dan "I", tetapi perantara ini tidak tampil di kalimat secara terbuka atau langsung. Ia hadir di benak orang yang terlibat dalam komunikasi plesetan itu. Pada kalimat yang kedua ada kaitan perantara yang menjembatani "love you" dan "layu". Adapun kalimat ketiga dibayang-bayangi kaitan antara "ayam goreng" dan "I am going".

Persoalannya tidak terhenti di situ. Perlu ditegaskan bahwa semua kaitan perantara itu sangat rentan dan bersifat sewenang-wenang. Semuanya hanyalah berlangsung pada aras suara atau audio yang tidak mempunyai sangkut paut dengan makna atau realitas di dunia objektif. Makna "air" tidak mempunyai sangkut paut dengan makna "I", apalagi dengan benda cair atau manusia yang menunjuk diri sendiri. Begitu juga kaitan-kaitan perantara dalam contoh-contoh yang lain. Maka ketika terjadi pencampur-adukan yang tidak terduga antara setiap pasangan itu, kita dapat terhenyak sejenak. Ini yang saya maksud dengan tidak ada atau kurangnya keterpaduan formal. Berlapis-lapisnya kaitan tak langsung itu dan kurangnya keterpaduan formal tampak lebih menonjol apabila dipertimbangkan bahwa contoh-contoh tadi merupakan campur-aduk yang diramu dari dua sistem bahasa yang berbeda; bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Jenis plesetan yang pertama ini masih mempunyai dua "saudara" dekat. Boleh dikatakan bahwa keduanya merupakan sub-kategori dalam kelompok yang sama. Ada satu ragam plesetan yang berusia lebih tua, tidak melulu berpusat di Yogyakarta, dan yang sudah umum kita kenal lewat sejumlah pelawak di panggung hiburan atau acara televisi. Ragam itu adalah plesetan yang menuntut kemahiran mengundang tawa penonton dengan mendistorsi kata sehingga terbentuk kata-kata lain yang sebenarnya tak punya sangkut-paut atau malahan tak bermakna, tetapi kedengarannya lucu. Misalnya *kepala* menjadi *kelapa*, *tolong* menjadi *lontong*, *airport* menjadi *air pot* atau *partisipasi* menjadi *partisisapi*. Ketika meriah-meriahnya perayaan ulang tahun emas proklamasi kemerdekaan RI, di sebuah warung makan, seorang mahasiswa bernyanyi: "Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah ... hari-hari teh Sosro..."

Beberapa plesetan yang menjadi khas para pelawak tersebut dapat dibedakan sedikit dari yang saya golongkan sebagai plesetan Yogya 1990-an jenis pertama di atas. Bedanya ialah bahwa plesetan para pelawak ini menampilkan sosok lugu, sok bodoh, *ndesani*, dan konyol. Ini terungkap dari kesan tidak mampu mengucapkan istilah-istilah teknokratik semacam *partisipasi* dengan benar. Tidak kebetulan bahwa banyak sekali pelawak yang tampil di panggung dalam bingkai sebuah cerita, dengan berperan sebagai pembantu rumah tangga. Adapun plesetan jenis pertama yang saya sebut di atas menampilkan sosok kelas menengah (juragan para pembantu itu), yakni berkemampuan bukan menguasai, tetapi mempermainkan istilah-istilah asing (milik bangsa kolonial atau neo-kolonial) yang sedang bergengsi! Akan tetapi, karena dari segi bentuk kedua kelompok plesetan itu masih relatif mirip, saya tidak memisahkannya menjadi dua jenis.

Ada satu lagi sub-kategori "plesetan" yang saya anggap masih sekeluarga plesetan jenis pertama. Sebagai contoh, dapat disebutkan di sini sejumlah grafiti yang mendistorsikan istilah pribumi menjadi sedikit ke-Barat-Baratan, tanpa sepenuhnya melenyapkan unsur yang pribumi itu. Yang dimaksud di sini ialah semacam penulisan pesan yang sengaja ditumpuki coretan tanda silang, misalnya *Perex* untuk apa yang lazim disebut *perex* (perempuan eksperimen), *wedhuz* untuk *wedus* (Jawa: 'domba'), atau *ghendenk* untuk *gendeng* (Jawa: 'gila'). Sejumlah nama tempat, misalnya nama warung *Takashimura* untuk *tak kasih murah* (Jawa: 'saya berikan dengan harga murah') atau *Niki Echo* untuk *niki eco* (Jawa: 'ini lezat') dapat dianggap sebangsa. Nama-nama gang kaum muda atau nama warung seperti ini punya corak selera kelas-menengah kota yang dapat dibedakan dari para pelawak yang membodoh-bodohkan diri untuk melucu itu. Akan tetapi, berbeda dari plesetan kelas menengah yang tersebut pertama, grafiti dan nama-nama gang ini membatasi plesetan pada tipografi satu atau dua kata belaka. Sifatnya lebih dingin, dan serius.

Jenis plesetan yang kedua menjegal suatu kemapanan atau kelaziman rangkaian pesan, tetapi diikuti dengan terbentuknya sebuah rangkaian pernyataan baru yang mempunyai tingkat keterpaduan formal. Beberapa contohnya disebutkan oleh Budy Wahyono (1991), seorang guru SMTA di Semarang, yang ikut memeriahkan pembahasan tentang plesetan lewat sebuah harian lokal di Yogyakarta: "Tong kosong berbunyi ... glondang!" Saya ingat pernah mendengar seseorang mengubah pepatah "sambil menyelam minum air" menjadi "sambil menyelam minum kopi". Seorang penyiar radio ABC pernah berkomentar: "Kalau orang lain tidak bisa tidur karena minum kopi, saya tidak bisa minum kopi kalau tidur."



Pada contoh pertama di atas yang menjadi sasaran penjejalan oleh kalimat plesetan adalah pepatah, "Tong kosong berbunyi nyaring". Berbeda dari plesetan jenis yang pertama di atas, pada plesetan jenis kedua ini kita mendapatkan kalimat-kalimat baru yang secara relatif dapat dikatakan mempunyai keterpaduan formal. Plesetan itu juga dapat dianggap mempunyai "kebenaran" referensial yang dapat dicari di dunia realitas. Kaitan antara "tong kosong" dan "berbunyi glondang" memang tidak alamiah dan mutlak. Akan tetapi, kaitan di antara kedua frasa itu jauh lebih dekat ketimbang kaitan di antara "air" dan "love you" atau antara "love you" dan "sebelum berkembang" pada contoh-contoh plesetan jenis pertama. Maka plesetan jenis kedua ini dapat disebut sebagai *plesetan alternatif*, karena plesetan ini mengajukan sebuah penalaran atau acuan alternatif terhadap yang sudah atau sedang lazim/dominan/resmi dalam masyarakat.

Ada dua sub-kategori yang dapat dimasukkan segolongan dengan plesetan jenis kedua ini. Yang pertama ialah sejumlah praktek berbahasa di antara remaja/pemuda, misalnya, yang dinamakan 'prokem' (Jawa Barat) atau bahasa 'walikan' (Jawa Timur). Bahasa kaum muda ini menggubah penanda, bukan pada makna atau hubungan referensial dengan realitas di luar bahasa. Mirip dengan plesetan jenis pertama, plesetan ini mendistorsikan susunan penanda yang sudah lazim. Akan tetapi, berbeda dari plesetan jenis pertama, bahasa bentukan ini tidak dinikmati hanya sebatas distorsi bentuknya itu sendiri, tetapi fungsi praktisnya sebagai penanda yang mengacu pada realitas empirik di luar bahasa.

Prosedur pembentukan praktek berbahasa demikian mirip dengan apa yang dikenal sebagai bahasa Jawa Krama, yakni bahasa yang dibangun dari bahasa yang sudah ada, dan kemudian disebut Jawa Ngoko. Perlu dicatat bahwa dalam perkembangan selanjutnya, praktek berbahasa prokem atau walikan lama kelamaan kehilangan sifatnya sebagai plesetan yang hanya hadir sebagai pembelokan pernyataan lain yang sudah dilazimkan. Lama kelamaan praktek berbahasa yang termasuk dalam sub-kategori ini menjadi mandiri, melupakan apa yang semula dijadikan sasaran pembelokan praktek berbahasa. Gejala yang sama dapat dikatakan untuk *Taglish* (Tagalog English) di Filipina, atau *Singlish* (Singaporean English) di Singapura.

Ada sub-kategori lain dari plesetan jenis kedua ini. Plesetan ini merupakan sub-kategori yang paling ekstrem dari mekanisme kerja plesetan jenis kedua. Contohnya dapat ditemui pada sebagian besar karya-karya sastra dan teater oleh Putu Wijaya. Saya katakan dalam bentuknya yang ekstrem, karena dalam karya-karyanya Putu Wijaya tidak sekadar memberikan lelucon-lelucon kecil seperti apa bunyi alternatif untuk tong kosong. Ia menampilkan persoalan-per-

soalan kehidupan sosial yang sangat serius. Apa yang serius ini bisa berwajah persoalan 'besar' seperti kekuasaan negara, atau 'kecil' seperti soal orang berpacaran atau kerja rutin seorang pegawai rendahan. Namun, semuanya serius karena menyangkut kehidupan sehari-hari banyak orang.

Saya beranggapan bahwa karya-karya Putu Wijaya masih sekelompok dengan plesetan jenis kedua, karena Putu Wijaya tidak hanya bermain-main dengan kata-kata atau logika dalam dirinya sendiri seperti pada plesetan jenis pertama. Karya-karyanya bukan tidak mempedulikan realitas dunia, dengan berbagai keindahan dan kebengsekannya. Ia seringkali menunjukkan bahwa ada banyak yang baik, yang benar, yang pantas dalam kehidupan sehari-hari tetapi selama ini diabaikan, atau dianggap aneh, ekstrem, lucu, atau salah oleh masyarakat yang membaca karya-karyanya. Hal ini tidak selalu dikisahkan secara aneh-aneh, fantastis, surealis, atau anti-realis, misalnya orang mati bisa hidup kembali atau wanita berpayu dara tiga buah. Berbagai kejutan dan plesetan Putu Wijaya bisa tampil dengan cara-cara realis lewat pengkisahan yang sangat lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membedakannya dengan novel bercorak "wayang-plesetan" atau "wayang-mbeling" yang pernah ditulis oleh Yudhistira A. Nugraha atau Pipit R.K.<sup>6</sup>

Plesetan jenis ketiga dapat disebut sebagai plesetan oposisi, karena plesetan ini memberikan nalar dan acuan yang secara konfrontatif bertabrakan atau menjungkirbalikkan apa yang sudah atau sedang lazim/dominan/resmi/ dalam masyarakat. Sementara sesuatu yang alternatif tidak selalu berwatak oposisional, yang oposisional pasti bersifat alternatif terhadap apa yang lazim. Plesetan oposisi menjejal suatu ungkapan yang sudah lazim, dan menciptakan ungkapan baru yang tidak saja terpadu secara formal dan tidak saja berbeda secara referensial dari yang sudah lazim, tetapi berambisi mengungkapkan makna yang lebih mendekati kebenaran referensial ketimbang ungkapan lama yang sudah telanjur lebih lazim. Plesetan jenis ini bukan sekadar menggantikan satu tan-

<sup>6</sup> Patut diingat bahwa di satu pihak, komentar tentang karya-karya Putu Wijaya di sini tidak berlaku secara umum untuk semua karyanya. Di pihak lain, kehebatan beberapa karya Putu Wijaya jauh lebih luas dan kompleks daripada yang disebutkan dalam dua alinea pendek ini. Di sini kita tidak membahas karya-karya Putu sebagai pokok utama, namun sejauh karya-karyanya mempunyai beberapa unsur yang bisa menjadi contoh kecil untuk pokok bahasan kita tentang plesetan. Oleh karena itu, rincian yang lebih tepat tidak saya berikan di sini. Biasanya kita tidak perlu terlalu peduli dengan apa kata seorang pengarang tentang karyanya. Akan tetapi, tidak ada jeleknya jika pengakuan Putu Wijaya tentang proses kreatifnya dikutip sebagai catatan-akhir: "Saya memilih hal yang kecil-kecil. Yang lucu tapi unik." (1982:305).

da/makna dengan tanda/makna lain, tetapi menjungkirbalikkan nilai atau perlawanan frontal terhadap tanda/makna yang lama. Yang biasanya positif menjadi negatif. Yang biasanya terhormat menjadi tercela. Atau sebaliknya. Yang banyak menjadi sasaran plesetan jenis ketiga ini adalah berbagai singkatan.

Dua contohnya dikutip Budiawan (1994) dari kolomis Eko Budiardjo (1994): RSS yang biasanya diartikan "Rumah Sangat Sederhana" menjadi *Rumah Sangat Sengsara* atau *Raosipun Sumuk Sanget*. IDT yang semula dimaksudkan sebagai singkatan "Inpres Desa Tertinggal" diplesetkan menjadi *Iki Duite Teko*. Tentunya kita sudah sering mendengar bagaimana KUHP yang lazimnya dibakukkan sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sering diplesetan menjadi *Kasih Uang Habis Perkara*. Kita juga ingat pada tahun 1989 ketika SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) baru saja diluncurkan untuk menggantikan Porkas dan TSSB (1986) serta KSOB (1988), ada yang mengartikan SDSB *Sama Dengan SeBelumnya*.

Ketika pemerintah Orde Baru masih gemar mengutuk musuh-musuh politiknya dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan yang disingkat GPK, sejumlah demonstran mahasiswa di Yogyakarta menamakan diri GPK sebagai singkatan *Gerakan Penuntut Keadilan* (*Suara Merdeka*, 22/09/93, 4). Contoh plesetan terhadap pepatah dari Budy Wahyono telah dikutip di atas untuk contoh plesetan alternatif. Contoh lain dari orang yang sama menggambarkan plesetan oposisi "Sedikit-sedikit lama-lama jadi ... habis". Ini mengingatkan kita akan penjungkirbalikan pepatah Jawa "mangan ora mangan asal kumpul" (makan atau tidak makan asal berkumpul bersama) menjadi "kumpul ora kumpul asal mangan".

### Bobot Politik Plesetan

Plesetan seringkali diperdebatkan terutama dalam fungsinya sebagai tanggapan politik kaum yang lemah terhadap tata-sosial dan penguasa yang lalim. Dalam perdebatan semacam itu sering terjadi polarisasi di antara mereka yang meyakini plesetan sebagai senjata ampuh kaum lemah (misalnya, Salim 1991; Wahyono 1991; Susanto 1992; Rahardjo 1996) melawan mereka yang mengingatkan bahwa plesetan bukanlah senjata perlawanan tetapi hanyalah sebungkus pelarian diri dari kenyataan yang sulit (misalnya, Nadjib 1991; Yuliantoro 1991). Ada juga mereka yang menempatkan diri di antara kedua ujung itu (misalnya, Faruk 1991; Budiawan 1991, 1994).

Menurut pengamatan sementara saya, perdebatan semacam itu tidak akan dapat berlangsung dengan lancar atau seru selama belum ada kesepakatan ter-

batas tentang apa yang dimaksud dengan plesetan itu sendiri. Tentu saja ada banyak pengertian plesetan yang dapat dipilih untuk diperdebatkan. Akan tetapi, batasan dan pilihan pengertian kunci itu mutlak perlu ditegaskan di awal perdebatan. Sayangnya, hal itu tampaknya jarang terjadi. Orang sering berdebat tanpa terlebih dahulu memperhitungkan apakah yang diajak berdebat mempunyai pengertian yang kurang lebih sama dengan yang dipakainya. Banyak pihak mengasumsikan seakan-akan hanya ada satu pengertian/jenis plesetan, atau mengasumsikan bahwa orang-orang lain yang diajak berbincang mempunyai pengertian yang sama.

Pembedaan variasi plesetan yang saya ajukan di atas mungkin dapat sedikit membantu mengurangi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam suatu perdebatan tentang bobot politik plesetan. Saya katakan hanya "membantu mengurangi". Pembedaan di atas masih belum menjamin lancarnya sebuah perdebatan seru tentang pokok itu. Penilaian atas bobot politik suatu plesetan yang serius masih membutuhkan perincian lebih jauh berbagai faktor lain yang ikut berperan, dan pertimbangan atas konteks aktual dari plesetan itu. Dengan kata lain, dibutuhkan suatu tinjauan kasus yang mendalam yang bersifat partikular dan konkret, bukannya kajian di tingkat abstrak dan universal.

Dengan segala kerendahan hati, sebatas kemampuan "sedikit mengurangi" kemungkinan kebingungan itu tadi, di bawah ini dapat kita simak bagaimana setiap jenis plesetan secara potensial dapat membawa bobot politik. Ketiga kelompok besar jenis plesetan di atas saya bedakan bukan berdasar kadar kelucunya. Semua bisa sama lucunya. Yang membedakan ketiga kelompok itu adalah dua hal ini: (a) kadar keterpaduannya secara formal antara satu tanda dan tanda lain dalam satu pernyataan, serta (b) bobot referensial atau jarak yang menghubungkan susunan pernyataan itu dengan apa yang dapat dianggap sebagai realitas empirik di dunia nyata yang diacunya. Untuk jelasnya, izinkan saya membuat pengulangan sedikit di sini.

Pada plesetan jenis yang pertama (plesetan untuk berplesetan itu sendiri) tingkat keterpaduan formal antara penanda-makna-acuan dalam pernyataan yang terbentuk rendah sekali dibandingkan dengan jenis-jenis plesetan yang lain. Pada plesetan jenis pertama ini semacam gado-gado tingkat tinggi. Plesetan jenis ini tidak berminat menyampaikan pesan atau komentar apa pun tentang realitas dunia di luar bahasa. Plesetan ini dibentuk terutama sebagai bukti ke-liaran dan kesewenang-wenangan pembentukan kaitan antara tanda-makna-realitas. Plesetan jenis ini meledakkan fungsi estetik atau puitik dalam bahasa yang dimungkinkan oleh hakikat bahasa itu sendiri.

Plesetan jenis kedua (*plesetan alternatif*) mempertahankan sedikit lebih



banyak kadar keterpaduan formal kebahasaan dibandingkan dengan plesetan jenis pertama. Plesetan jenis ini mengacu pada realitas di dunia, yakni pada sisi-sisi lain (alternatif) dari realitas di luar bahasa yang sedang atau sudah lazim/dominan/resmi. Acuan alternatif ini mungkin lebih penting/sama penting atau tidak sepenting dengan acuan yang sudah lazim/dominan/resmi. Namun, dengan memberikan acuan alternatif, acuan yang lazim/dominan/resmi tidak lagi menjadi acuan tunggal dalam kesadaran masyarakat. Dengan kata lain, plesetan alternatif menggugat penunggalan suatu makna yang lazim/ dominan/resmi tanpa berusaha meniadakan yang terlanjur lazim/dominan/resmi itu.

Fungsi referensial bahasa justru menjadi bobot utama bagi plesetan jenis ketiga (plesetan oposisi). Plesetan jenis ini juga mempertahankan keterpaduan formal pada waktu menyelewengkan sebuah pernyataan lazim/dominan/resmi. Ia tidak hanya menggubah suatu rumusan pernyataan yang terlanjur lazim, tetapi sekaligus memberikan acuan terhadap realitas dunia yang bertolak belakang dengan apa yang sudah lazim. Jadi, bobot utama plesetan jenis ketiga ini bukan pada kenikmatan bermain-main dengan penanda, atau memberikan kemajemukan nilai alternatif pada acuan realitas, tetapi mengunggulkan suatu nilai-tanding terhadap yang sudah lazim/dominan/resmi dalam masyarakat dan berusaha menyerang yang sudah lazim/dominan/resmi.

Moga-moga pengulangan ini memperjelas implikasi sosial masing-masing, paling sedikit secara abstrak dan potensial. Dalam banyak konteks yang sudah kita kenal plesetan jenis pertama sering kali hanya tampil sebagai hiburan. Tentu saja hiburan bukan barang yang haram. Hiburan bisa menunjang kesehatan. Dalam bentuknya yang paling canggih, plesetan jenis pertama ini tidak hanya lucu, tetapi mengandung bobot estetik, meskipun tidak (secara langsung/formal) berbobot politik.

Dalam kenyataan masyarakat sekarang tidak berlebihan apabila ada yang mencurigai plesetan jenis ini sebagai kegemaran orang yang menganggur, iseng, atau tidak berdaya. Plesetan ini menjadi semacam "pelarian" dari problema dunia dan hanya memainkan gambaran tentang dunia, tanpa berupaya memberikan sumbangan untuk mengubah dunia itu supaya lebih baik. Plesetan ini dianggap bisa serius, yakni ketika menjadi komoditi (barang dagangan) dalam industri tontonan hiburan. Tujuan yang dikejar oleh plesetan jenis ini adalah kepopuleran dan tawa para penonton, sesuai dengan tuntutan hukum pasar dan persaingan dagang.

Yang lebih rumit untuk dilakukan secara abstrak begini adalah menilai atau mem-bandingkan bobot politik plesetan alternatif (jenis kedua) dan oposisi (jenis ketiga). Sepintas lalu plesetan oposisi mempunyai tampang lebih garang

dan berani menantang kekuasaan ketimbang plesetan alternatif. Akan tetapi, perbandingan ini hanya dapat dibenarkan secara abstrak. Dalam kenyataan konkret terbuka kemungkinan yang sebaliknya. Mengapa demikian? Plesetan oposisi memang secara langsung menyerang kemapanan dengan menjungkirbalikkan tatanilai yang ada. Namun, dengan tindakan itu, plesetan oposisi masih mempertahankan unsur-unsur yang dijungkirbalikkan dan hanya status masing-masing unsur yang ditukar. Plesetan ini tidak benar-benar transformatif.

Plesetan alternatif memang bertampang lunak dan jinak dibandingkan dengan plesetan oposisi, apalagi, jika plesetan alternatif hanya mempersoalkan bunyi tong kosong. Kalau sebatas ini, plesetan ini tidak jauh berbeda daripada hiburan ringan seperti plesetan jenis pertama. Namun, dalam sosoknya yang radikal, seperti yang ditunjukkan oleh karya-karya sastra Putu Wijaya, plesetan alternatif bertindak lebih jauh secara politik ketimbang plesetan oposisi. Plesetan alternatif bisa lebih demokratis karena ia berpeluang menggugat dominasi suatu makna/acuan, tanpa membinasakannya. Plesetan ini lebih radikal dan inovatif karena bukan sekadar menjungkirbalikkan yang sudah ada, namun memperkenalkan makna/acuan baru atau yang belum banyak dikenal/diakui dalam kesadaran masyarakat.

Dalam plesetan oposisi, yang jahat pada pengertian lazim/dominan/resmi dijungkirbalikkan menjadi pahlawan dan yang biasanya dimuliakan dijungkirbalikkan menjadi terhina. Plesetan jenis ini dengan tegas bersifat hitam-putih, menarik garis tegas antara lawan dan kawan. Wataknya heroik dan tegas-tegas politis dalam pengertian yang ekstrem. Dalam plesetan alternatif, seperti yang ditunjukkan oleh Putu Wijaya, pertentangan antara penjahat/pahlawan atau kawan/lawan dicairkan, dibaurkan, atau diaduk-aduk. Tidak jelas lagi mana yang baik/buruk atau kawan/lawan. Plesetan ini lebih bersifat anarkis, tidak berlagak heroik, dan berbobot politik radikal, walaupun (atau justru karena) kepolitikannya tidak kelihatan gamblang.

Sekali lagi saya ingin mengutip pengakuan Putu Wijaya sendiri, walaupun seperti sudah saya katakan kita tidak perlu langsung mempercayai pengakuan penulis atas karyanya. Menurut pengamatan saya, pengakuan berikut ini telah terbukti bukan saja dalam karya-karya Putu Wijaya yang sudah ditulisnya, tetapi juga yang ditulis beberapa tahun kemudian:

Saya ingin orang melihat lagi alternatif untuk memilih dan kemudian memilih sendiri untuk dirinya berdasarkan citra masing-masing. ... Saya memilih ... Yang tidak diutak-atik orang lain.... supaya mau menyangsi-



kan lagi segala sesuatu. Saya memancing dan merangsang ... kemudian mengelak, karena bukan pendapat saya yang penting ... (1982:305)

Apabila dikaitkan dengan masalah kebahasaan, sikap politik plesetan alternatif ala Putu Wijaya ini boleh jadi yang paling radikal. Ia berangkat dari kesetiaan pada prinsip yang paling mendasar dari hakikat bahasa: yakni kaitan antara tanda-makna-realitas sepenuhnya bersifat sewenang-wenang. Tulisan Putu juga paling radikal apabila menyangkut penilaian baik/buruk atau penjahat/pahlawan. Di sini tidak ada yang objektif, alamiah, atau representatif secara tegas. Saya katakan Putu Wijaya "boleh jadi yang paling radikal", karena kepastian untuk penilaian demikian masih ditentukan oleh banyak faktor lain yang tidak dapat dibahas panjang lebar di sini.

Dalam tradisi budaya politik di Eropa dikenal aliran Bakhtin yang dekat dengan sikap politik Putu Wijaya. Bedanya, aliran Bakhtin tidak mau terhanyut dalam relativisme yang seakan-akan dapat diperpanjang tanpa batas sebagaimana mewarnai strategi Putu Wijaya. Relativisme yang mutlak tidak lagi menjadi relativistik. Dalam aliran Bakhtin, kesewenang-wenangan bahasa tidak sama dengan acak. Bahasa sewenang-wenang dalam sebuah lingkungan, tetapi senantiasa mengejawantahkan diri dalam bentuk-bentuk konkret yang khusus dan mempunyai watak ideologis. Inilah sebagian dari yang pernah ditulis Bakhtin dalam sebuah versi terjemahan bahasa Inggrisnya:

But no living word relates to its object in a *singular* way: between the word and its object, between the word and the speaking subject, there exists an elastic environment of other, alien words about the same object, the same theme, and this is an environment that it is often difficult to penetrate. It is precisely in the process of living interaction with this specific environment that the word may be individualized and given stylistic shape. (Bakhtin 1981:276)

### Kasus-kasus Kesewenangan

Dalam abad ke-20 ini marxisme dan post-strukturalisme merupakan dua isme yang pernah akrab dengan gerakan aktivisme politik dan budaya di dunia. Keduanya relevan disebutkan di sini, karena marxisme mempunyai wawasan yang sangat dekat dengan plesetan oposisi. Adapun post-strukturalisme dekat sekali dengan plesetan alternatif gaya Putu Wijaya. Hal ini perlu disebutkan sekadar untuk mengingatkan bahwa plesetan merupakan sebuah gejala bahasa yang sangat universal. Tidak khas Jawa. Dalam acara tanya-jawab menyusul

penyampaian makalah Budi Susanto pada Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya kelima, banyak hadirin menyebutkan contoh-contoh plesetan di berbagai tempat lain di luar Jawa (1992:63-65).

Plesetan bukan sebuah lelucon atau kenakalan yang iseng semata-mata. Dekonstruksi yang dikembangkan sejumlah filosof Eropa merupakan hasil serius dari upaya menjelajahi implikasi paling jauh dari kesewenang-wenangan bahasa (tanda/makna/realitas). Dari mereka kita dapat belajar banyak hal, dan sebagian di antaranya perlu disinggung di sini biarpun selintas.

Puncak-puncak cemerlang dalam peradaban manusia dicapai bukan tanpa jasa ke-sewenang-wenangan bahasa (tanda/makna/realita). Setiap bentuk ketertiban dan tata-sosial hanya dapat dimungkinkan oleh stabilitas sebetulnya kesewenang-wenangan yang tidak dikenali lagi sebagai kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan itu tampil seakan-akan rasional, realis, alamiah, atau objektif. Yang berbeda dari semua itu dianggap sebagai kelainan, penyimpangan, kecelakaan, kegilaan, atau lelucon. Plesetan adalah salah satu contohnya. Demikianlah berbagai identitas sosial seperti menjadi orang "Indonesia", atau "Timur", atau "perempuan", atau "Jawa", atau "pribumi", atau "Komunis", atau "Kristen" telah diteguhkan dengan cara-cara yang sewenang-wenang. Berdasarkan semua itu sebuah tata tertib dan tata sosial dipertahankan.

Sebuah sejarah dapat ditulis berpanjang lebar untuk menggambarkan bagaimana kesewenang-wenangan itu dibikin, disangkal, dan kemudian berhasil dimapankan dengan berbagai pengorbanan pihak yang dirugikan dan rezeki bagi yang diuntungkan. Semua itu berlangsung di depan mata para ahli bahasa, tanpa banyak komentar dan intervensi dari mereka yang lebih sibuk dengan mengotak-atik awalan, atau bentuk-bentuk kalimat majemuk, dan peng-Indonesiaan nama-nama asing pada merek dagang di Jakarta. Untuk keperluan kita sekarang di sini, saya hanya akan menyebutkan beberapa contoh kasus "kecil" yang paling mutakhir di negeri ini.

Pada saat naskah awal tulisan ini masih saya susun, nasib sejumlah warga negara Indonesia sedang dipertaruhkan gara-gara kesewenang-wenangan pemaknaan bahasa (yang tidak dapat dilepaskan dari kesewenang-wenangan praktek kekuasaan politik). Di Pengadilan Negeri Sleman (DIY) seorang paranom diadili karena dalam ceramahnya setahun sebelumnya ia menggunakan istilah yang dianggap tidak tepat/pantas. Dalam sidang kesebelas, pengadilan atas dirinya mempersoalkan apa persisnya makna kata *diktator* dan *otoriter*. Pada waktu yang hampir bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang berlangsung tiga pengadilan terpisah, namun semuanya menyangkut pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah atau pejabatnya. Di Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta berlangsung sidang gugatan dari Teater Buruh Indonesia yang mengalami kesulitan mementaskan pertunjukan teater dari Direktorat Sosial Politik DKI Jakarta. Yang menjadi alasan adalah digunakannya istilah "buruh" pada nama grup teater itu dan istilah "terpuruk" pada judul pementasan. Di Cimindi (dekat Bandung) sejumlah penjual bakso diinterogasi pejabat polisi dan militer, gara-gara salah seorang dari mereka menulis grafiti berbunyi "PKI Madiun Bangkit" sebagai bagian dari hiasan perayaan hari ulang tahun proklamasi RI ke-50.

Kalau mau sedikit diperluas, boleh dikatakan bahwa sejak tahun 1989 terjadi panen paling meriah dalam pengadilan atas para aktivis muda Indonesia dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan terhadap pejabat negara (pasal-pasal warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang dulu bernama *haatzai artikelen*). Pada tahun 1989 itu seorang aktivis mahasiswa Jakarta, enam orang aktivis mahasiswa Bandung, dan dua pemuda Yogyakarta ditangkap, ditahan, diadili dengan pasal-pasal pernyataan penghinaan dalam berbagai kasus yang berbeda.

Pada tahun 1991 seorang aktivis LSM dari Salatiga didakwa melanggar pasal yang sama. Tahun berikutnya pasal-pasal yang sama memangsa dua mahasiswa Semarang. Tahun 1993 yang menjadi korban adalah seorang aktivis LSM Semarang dan 21 mahasiswa dari berbagai kota. Dalam beberapa bulan ini, nama-nama seperti Arief Budiman, George Junus Aditjondro, Sri Bintang Pamungkas, dan Abdurrachman Wahid adalah sebagian dari orang-orang yang disorot karena kasus-kasus pernyataan yang dituduhkan menghina pihak lain.

Jelas kita tidak membutuhkan daftar yang lengkap. Apa yang sudah disebutkan di atas sekadar menunjukkan betapa serius dan meluas persoalan batasan makna "menghina" atau "tidak menghina" dalam kehidupan berbahasa di Indonesia masa ini. Sedikit di bawah seriusnya batasan makna "bersih lingkungan" atau "tidak bersih lingkungan". Semua itu berlangsung, sejauh saya amati, tanpa perhatian dan kepedulian dari para ahli bahasa kita yang setiap tahun mengadakan berbagai pertemuan tingkat tinggi tentang kebahasaan!<sup>7</sup> Sebagian

<sup>7</sup> Sejak tahun 1989 saya telah berkali-kali diminta terdakwa dan penasihat hukum pada beberapa kasus itu untuk tampil di sidang pengadilan sebagai saksi ahli (bahasa). Permintaan itu saya terima sebagai kehormatan bukan saja kepada saya pribadi, tetapi juga ilmuwan bahasa. Sayang hampir selalu majelis hakim menolak apa yang menjadi hak terdakwa sebagaimana dilindungi KUHAP. Sejauh pengamatan saya Drs. Lukman Hakim merupakan orang pertama yang diizinkan pengadilan di Indonesia untuk memberikan kesaksian sebagai ahli bahasa dalam sidang yang memeriksa kasus penghinaan di Pengadilan Negeri Sleman (8 Agustus 1995) seperti saya sebutkan di atas. Dua minggu berikutnya saya diizinkan tampil sebagai

dari kasus-kasus hukum itu malahan secara langsung berurusan dengan soal plesetan. Perhatikan misalnya, kasus pentas panggung hiburan oleh dua pemuda di Yogyakarta serta dua pemuda lain di Salatiga, serta dua mahasiswa di Semarang (semuanya terjadi pada tahun 1992), pada demonstrasi SDSB di Jakarta yang memakan korban Nuku Sulaiman (1993/4), dan ceramah akademik di sebuah kampus di Yogyakarta yang memangsa George Junus Aditjondro (1994/5).

Apakah ini sebetulnya ketidakpedulian para ahli bahasa kita? Mungkin. Jika ya, apakah ketidakpedulian ini semata-mata disebabkan oleh kesadaran mereka akan seriusnya ancaman hukuman di balik kajian tentang plesetan? Tampaknya tidak. Apakah persoalannya hanya sekadar karena ketakutan yang berlebihan terhadap takhayul yang tidak nyata? Juga tidak. Saya curiga persoalannya jauh lebih serius, mendasar, sistemik, dan mempunyai sejarah yang panjang. Ada semacam tembok-tembok kukuh yang menyulitkan para ahli bahasa kita untuk menggumuli persoalan-persoalan bahasa yang hidup dalam masyarakatnya. Pendidikan bahasa di masyarakat kita secara menyeluruh cenderung mengasingkan kita dari gejolak masyarakat kita sendiri.

Untuk sedikit menjelaskan yang saya maksudkan, sekaligus sebagai penutup, berikut ini saya kutip kembali apa yang pernah saya tulis di dalam sebuah makalah untuk memperingati Bulan Bahasa tahun 1993.<sup>8</sup>

Sejarah kajian ilmiah tentang bahasa di Indonesia pada intinya dan secara kasaran dapat dikatakan sebagai sejarah pelecehan terhadap bahasa. Pada pokoknya, bahasa diperlakukan pertama-tama dan yang terutama sebagai "alat" atau instrumen. Lebih tepatnya lagi sebagai "alat komunikasi."

Sebagai alat, bahasa pada hakikatnya dianggap bersifat netral. Ia baru bersifat baik atau tidak baik dalam praktek penggunaannya oleh pihak (agen) tertentu. Dengan demikian, dalam pandangan instrumentalis ini, si pengguna adalah subjek-subjek yang merdeka dan dengan bebas bisa

saksi ahli bahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

<sup>8</sup> Makalah berjudul "Bulan Bahasa di Tahun Postmodernisme" untuk Sarasehan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diadakan oleh Balai Penelitian Bahasa, Yogyakarta, 21 Oktober 1993. Acauan halaman pada kutipan ini bersumber dari naskah yang asli. Makalah ini disunting dan diperpendek oleh redaksi *Republika*, yang memuatnya dalam edisi 26 dan 27 Oktober 1993 harian tersebut. Hasil gubahan redaksi *Republika* ini kemudian diterbitkan ulang dalam buku yang disusun oleh Suyoto dkk. (1994:175-185).

menunggangi, memperalat, menjungkir-balikkan, atau secara kreatif menyusun bahasa indah.

Sebagai alat, harga bahasa ditentukan oleh nilai-gunanya. Biasanya, walau tidak hanya, ini berarti kegunaan teknis-pragmatik-ekonomis. Dalam lingkungan sosial yang terkena demam pembangunan, bahasa yang dianggap baik adalah bahasa yang rasional, logis, sistematis, terpadu, hemat, standar. Singkatnya, bahasa yang baik adalah bahasa yang sangat kekar, tetapi patuh (seperti matematika, mesin, buruh, atau anggota militer).

.....  
Tidaklah aneh jika wawasan bahasa yang instrumentalis-demi-Pembangunan seperti itu baru dijumpai sebagai gejala besar pada masa bangkitnya kekuasaan sosial yang bernama Kolonialisme, yang pada gilirannya merupakan kerabat-kerja Kapitalisme.

Dalam masyarakat pra-kolonial dan pra-kapitalis, bahasa tidak pernah dilecehkan secara sekuler sekadar sebagai "alat komunikasi". Tetapi dalam masyarakat ini bukannya tidak ada masalah keterasingan manusia. Bukannya bahasa itu dilecehkan, tetapi sebaliknya justru dipuja-puja dan ditakuti. Bahasa tidak di-manusiawi-kan atau disosialkan. Terjadi "mistifikasi" mengenai kekuatan magis kata-kata lisan atau pun tulisan: bobot nama, nama keramat, mantera, aksara bertuah, dsb (hlm.2).

....  
Kekuasaan dalam modernitas dibentuk dengan mengerahkan ilmu pengetahuan (khususnya ilmu alamiah, matematika, teknik, ekonomi) dan aparatus represi (hukum, militer, polisi) untuk mengendalikan alam dan masyarakat atas nama "stabilitas dan keamanan". Mereka sangat takut, curiga dan anti kepada apa pun yang bersifat terbuka, majemuk, penuh kemungkinan.

Baik ilmu modern yang instrumentalis-tata-politik negara yang legalistik maupun militerisme yang represif mendambakan kepastian dan stabilitas. Keduanya merupakan prakondisi bagi pengawasan, pengendalian, penguasaan, dan penjajahan. Karena itu, ilmu, politik, dan militerisme sangat akurat dalam Pembangunan di berbagai negara sesudah Perang Dunia II. Salah satu agenda kerja utama mereka ialah menindas ambiguitas, keterbukaan, dan kemajemukan makna-makna dalam bahasa. Apalagi dalam sastra. Makna diusahakan agar bersifat tunggal dan baku. (hlm. 7).

Jika pengamatan di atas tidak terlalu keliru, maka bukanlah hal yang aneh apabila kerapian, keutuhan, dan puritanisme menjadi masalah-masalah yang diutamakan dalam kerja para ahli bahasa kita masa kini. Tidak mengherankan

apabila pelecehan bahasa semacam itu justru dipahami sebagai sikap ilmiah yang terhormat, jika bukan kecintaan patriotik kepada Pembangunan bangsa. Akan halnya plesetan, itu justru dimusuhi sebagai "pelecehan bahasa" yang "berbahaya" seperti dijelaskan oleh seorang Direktur Akademi Bahasa dalam pidato resmi di forum akademik baru-baru ini (*Suara Merdeka*, 03/08/95, 3).



SUMBER RUJUKAN PUSTAKA

- Bakhtin, M.M. 1981. *The Dialogic Imagination*, disunting Michael Holquist, terjemahan Caryl Emerson dan Michael Holquist. Austin: University of Texas Press.
- Berita Nasional*. 1991. "Hasan Boy: Pakar Amatir 'Plesetologi'", 14 Februari, hlm. 6.
- Budiawan. 1991. "Antara 'Kamar Gelap Individu' dan 'Harmoni' Sosial", *Berita Nasional*, 14 Februari, hlm. 6.
- \_\_\_\_\_. 1994. "'Plesetan', Bahasa, dan Kekuasaan", *Suara Merdeka*, 25 April, hlm. 6.
- Budihardjo, Eko. 1994. "Gayeng Semarang", *Suara Merdeka*, 10 April 1994.
- Faruk. 1991. "Plesetan Bukan Bentuk Kekerasan terhadap Bahasa", *Berita Nasional*, 28 Februari, hlm. 6.
- Heryanto, Ariel. 1991. "Ilmuwan, Jangan Buang 'Plesetan' ke 'Tong Sampah Budaya'", *Berita Nasional*, 21 Februari, hlm. 6.
- Horne, Elinor Clark. 1974. *Javanese-English Dictionary*. New Haven dan London: Yale University Press.
- Nadjib, Emha Ainun. 1991. "Pelesetan", *Tempo*, 23 Pebruari, hlm. 36.
- PPPB. 1974. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disunting Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Christanto P. 1996. "Dinamika Plesetan Jawa; sebuah konstruksi Anekdoktis Politis," *Prisma*, Th. XXV, No. 1, Januari, hlm. 17-22.
- Salim, Hairus. 1991. "Bukan Apa Plesetannya, tapi Mengapa Ada Plesetan", *Berita Nasional*, 14 Februari, hlm. 6.
- Susanto, Budi. 1992. "Yogya(kar)tamu: Berbudi-bahasa Jawa Dikaji Ulang", dalam *PELLBA 5: Bahasa Budaya*, disunting Bambang Kaswanti Purwo. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 41-68.
- Suyoto, dkk. (ed.). 1994. *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wahyono, Budy. 1991. "Plesetan Dianggap Salah, tapi Berfaedah", *Berita Nasional*, 21 Februari, hlm 8.

- Wijaya, Putu. 1982. "Dari 'Etsa' Sampai 'Zat'", *Horison*, No. 10, Th. XVII, hlm. 289-306.
- Yulianto, Dadang. 1991. "Plesetan sebagai Tanda Kerapuhan Tradisi Keilmuan", *Berita Nasional*, 28 Februari, hlm. 6.

## TANYA JAWAB

**A. A. Nugroho, Unika Atma Jaya:** Ada tiga pertanyaan dari saya. Yang pertama tidak serius: Plesetan Al-Fatihah termasuk plesetan apa, plesetan oposisi atau plesetan alternatif?

Yang kedua: Kita bisa juga melihat plesetan itu dari tingkat *reasoning*. Kalau dalam logika ada konsep, ada proposisi, dan ada *reasoning*. Mungkin dalam ilmu bahasa ada semantik, sintaksis, dan ada juga *narrative*. Yang sebenarnya sangat menarik dan mungkin belum pernah dilakukan di Indonesia, plesetan pada tingkat *reasoning* bukan hanya silogisme-silogisme. Kalau kita baca Umberto Eco, *How to Travel with a Salmon*, seluruh cerita serius, tapi sebenarnya plesetan. Sebenarnya itu merupakan kritik, atau alternatif atau oposisi, atau apa pun namanya yang luar biasa bagus. Saya belum melihat di Indonesia ada penulis seperti itu. Saya mencoba latihan terus, tapi saya ragu apakah *Kompas* mau memuat atau tidak. Jadi, plesetan tidak hanya pada tingkat semantik, tidak hanya pada tingkat sintaksis, seperti yang diberikan oleh Pak Ariel, tapi pada seluruh cerita. Narasi sendiri plesetan. *How to Travel with a Salmon* tidak berbicara tentang bagaimana kita berjalan bersama dengan seekor ikan salmon, tetapi servis yang jelek dari sebuah hotel.

Pertanyaan ketiga: Saya mempunyai kesan bahwa normalisasi bahasa didukung oleh kekuasaan politik dan ekonomi. Kadang-kadang kita melihat justru ada kelompok ahli ilmu sosial yang melihat fenomena sosial itu dari bahasa dan bahasa itu tidak mempunyai kekuatan. Itu katakanlah suatu *civil society*, sebuah paradigma sosial yang tidak menggunakan *force* yang terlihat dan terkristalisasi, seperti dalam kekuatan politik dan ekonomi. Kalau dalam pembicaraan Mas Ariel tadi, terutama berbicara tentang normalisasi ini, muncul pada awal revolusi industri dan kapitalisme. Saya kira sebelum revolusi industri, pada abad pertengahan pun, tidak hanya pada tingkat semantik, tingkat sintaksis sudah ada pembakuan atau ada normalisasi, bahkan ada bahasa yang standar.

Yang lain adalah *vernacular*, begitu istilahnya, pada abad pertengahan. Jadi, belum ada kekuatan ekonomi, revolusi industri belum ada, kapitalisme belum ada. Tapi *vernacular* sudah ada. Kita tidak usah pakai sejarah yang susah-

\* Perlu catatan dari editor untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tidak lama sebelum berlangsungnya PELLBA 9 ada kasus bahwa Menteri Penerangan Harmoko terpeleset membacakan surat Al-Fatihah pada pembukaan Festival Greget Dalang, 15 Juli 1995 di Solo.

susah. Baca saja *The Name of the Rose*, karangan Umberto Eco. Kelihatan bahwa bahasa Latin adalah bahasa standar, bahasa ilmu, bahasa filsafat, bahasa agama, dan yang lain *vernacular*. Jadi itu jauh sebelum kapitalisme. Kita tidak tahu bagaimana normalisasi itu muncul, itu pertanyaan yang cukup menarik. Itu mungkin keinginan orang untuk *order*, bahasa mungkin *order* minimal, mungkin juga kebutuhan untuk *game* sehingga Wittgenstein bicara tentang *language game*.

**Susi Deliani, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Harapan, Medan:** Apakah plesetan ini dapat dikategorikan juga sebagai variasi bahasa, yang selama ini kita tahu ada yang formal dan informal?

**Sudaryanto, UGM, Yogyakarta:** Yang pertama bukan pertanyaan, tapi hanya untuk meledek Pak Ariel. Tadi kita sudah disugesti secara ekspresif bahwa pokoknya topik ini harus diperhatikan oleh para linguist. Ini sangat penting, ini gejala universal. Agaknya jual kecapnya begitu, supaya kita semua yakin. Istilah universal, saya pikir perlu dipertimbangkan kembali, semangat yang mengebu-gebu saya kira perlu digembosi sedikit. Begini masalahnya. Kalau istilah ini dipakai, saya kira semuanya akan tersugesti. Saya berpikir bahwa bahasa di dunia ini jumlahnya ribuan. Menurut para ahli jumlahnya antara 5.000-7.000. Sampai hari ini para ahli belum tahu jumlahnya yang persis, karena setiap saat diketemukan bahasa yang baru. Lalu saya membayangkan, sekiranya plesetan ini ada, karena universal, di seluruh dunia, apakah teman-teman kita dari SIL menemukan ada plesetan di tengah Irian? Saya kira ini perlu dipertimbangkan. Apakah yang dimaksud dengan universal ini hanya terdapat pada banyak bahasa moderen? Mohon betul-betul dipertimbangkan karena berdasarkan penelitian yang diorganisasi oleh Greenberg (1978), selama sekitar delapan tahun, yang kemudian bukunya terbit empat jilid tebal, *Universals of Human Language*, tidak ada penelitian mengenai hal ini. Mungkin para linguist seluruh dunia bodoh semua. Ini gejala yang sangat penting, kok tidak diteliti. Bahkan pada saat meneliti tentang kesemestaan bahasa pun, ini sama sekali tidak muncul. Ini kritikan yang sangat hebat. Sebenarnya ini saya juga mengkritik Mas Ariel. *Mbok* jangan mengebu-gebu sekali.

Yang kedua: Masalah istilah sewenang-wenang agak dihaluskan oleh Pak Anton tadi, mohon diperhatikan sebenarnya pandangan Saussure ini juga ada yang melawan sekarang ini. Karena begitu dominannya istilah sewenang-wenang, atau acak, atau sebarangan itu, ada reaksi yang lain, yaitu John Heimann yang meneliti secara serius apakah bahasa itu betul-betul arbitrer. Agaknya ti-

dak. Ada prinsip mengapa menjadi arbitrer, ada tiga hal: pertama prinsip ekonomi, kedua prinsip asosiasi, ketiga prinsip generalisasi. Ini yang menjadikan tampaknya bahasa itu arbitrer. Saya tidak perlu berpihak pada yang mana, tapi ini bisa menjadi bahan renungan yang sangat baik bagi ahli bahasa termasuk Mas Ariel, yang menggebu-gebu.

**Oktavianus, Universitas Andalas, Padang:** Saya pernah ditanya seperti ini: Kucing disambar petir, apa bahasa Inggrisnya? Sebelum saya jawab, sudah dijawab *Eveready*. Kemudian juga, Burung terbang, apa bahasa Arabnya? Jawabannya adalah: Tak turun. Saya pernah baca bahwa Hamka pernah menyindir sifat seseorang kira-kira begini bahasa Arabnya: *Hajanat tuaha tafansa sirihu* (?), dan kira-kira bahasa Minangnya *Jantuah kapan saya sirik*. Pertanyaan saya: apakah ini tergolong plesetan? Kalau ya, termasuk kategori yang mana?

Pertanyaan kedua: menurut saya, plesetan itu bisa dalam bentuk penyembunyian makna, nuansa kritik, berkelakar. Menurut Bapak bagaimana?

**Yudianingrum, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Maranatha Bandung:** Saya mempunyai satu tanggapan dengan dua ilustrasi. Tanggapan saya adalah: Tadi saya rasa Bapak kurang membahas masalah konteks dan pemicu munculnya suatu plesetan. Padahal ini penting sekali, karena tanpa memahami konteks dan pemicunya orang tidak bisa ikut menikmati suatu plesetan. Ilustrasi yang pertama: Baru-baru ini kita menikmati suatu acara orkestra yang megah pada perayaan 50 tahun kemerdekaan di Istana Bogor. Ada yang bertanya: Tadi malam nonton, nggak, *toilet orkestra*? Nah, kalau kita tidak mengetahui konteks dan pemicunya, kita tidak bisa tertawa. Apakah dia memang mau menghina orkestra itu dengan memberi predikat *toilet* atau memang dia tidak bisa mengucapkan kata *twilight* dengan baik, sehingga menyebutnya dengan *toilet*. Jadi, untuk bisa tertawa kita harus tahu konteks dan pemicunya.

**Jawab (rangkuman untuk kelima penanya di atas):** Terima kasih atas semua tanggapan yang diberikan. Sebelumnya saya ingatkan bahwa dalam forum seperti ini tentu saja saya tidak tampil sebagai seorang ahli dalam segala hal, yang bisa menjawab semua pertanyaan. Yang saya harapkan adalah adanya suatu dialog, kita saling memberi-menerima. Tidak selalu saya memberi, Anda menerima. Seringkali saya yang menerima dan Anda yang memberi, dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau pun saya jawab, pasti tidak tuntas, pasti tidak memuaskan.

Saya mulai dari Pak Nugroho, tentang plesetan yang pertama, menurut saya jenisnya plesetan keramat atau plesetan sakti, begitulah. Saya tidak dapat memberikan jawaban yang serius untuk pertanyaan yang Anda katakan sendiri tidak serius.

Yang kedua adanya novel-novel yang hebat, bukan karena dia memberikan plesetan pada level sintaksis atau kalimat-kalimat atau cerita-cerita. Saya tidak tahu sejauh mana Anda membaca karya-karya Putu Wijaya. Kalau Anda membaca, saya justru ingin dengar, apakah menurut Anda tidak begitu. Hebatnya Putu ini tidak ada satu atau dua kalimat lalu bisa dikutip, tapi sejak halaman pertama sampai halaman terakhirnya nakal. Liar sekali, dan ceritanya kadang-kadang justru tidak fantastis, sehari-hari. Menakutkan sekali ternyata Putu ini. Ia bisa menampilkan cerita kepada kita hal-hal yang menakutkan, tapi ternyata akrab sekali dengan kehidupan kita. Eee, jangan-jangan itu terjadi dua jam yang lalu di kamar saya, dengan istri saya, atau dengan tetangga saya. Sederhana sekali. Itulah Putu.

Normalisasi bahasa memang sudah lama dan normalisasi tidaklah selalu jelek. Mohon tidak disalahpahami, dan jangan sampai Anda berpikir saya ini anti ketertiban, *anti-order*. Yang saya anti adalah *order* tunggal. Tolong jangan disalahpahami. Saya pikir tidak ada kehidupan tanpa *order*. Tanpa *order* kita tidak hidup. Dalam tubuh kita, dalam darah kita ada *order*. Yang saya coba lontarkan sesuai dengan semangat plesetan dan dekonstruksi adalah kemajemukan *order*. Kemajemukan tata tertib, tidak tunggal. Kebhinekaan dalam ketunggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting, kita harus maklum bahwa kadang-kadang berbagai *order* yang majemuk itu ada satu, yang *single majority*. Artinya apa? Tidak cuma dia *order*, dia harus menjadi *order* yang total, bulat, tidak lonjong. Yang seperti ini berbahaya. Yang begini ini harus diplesetkan. Bagaimana kita bisa menghormati perbedaan, itulah yang penting, kan seringkali itu tidak terjadi.

Menurut Pak Nugroho normalisasi sudah ada jauh sebelum adanya kapitalisme. Ini benar. Yang ingin saya katakan adalah dalam konteks sekarang jelas kebutuhan normalisasi itu berlipat ganda, lebih besar lagi. Lingkupnya, yang kita bicarakan, tidak main-main. Jadi, misalnya kepentingan gereja, itu yang bahasa Latin, kepentingan gereja Kastilia di Spanyol, jauh lebih kecil ketimbang sekarang. Ini yang namanya transnasional. Bagaimana mengatur, menghimpun, melaporkan uang, proyek, atau transaksi dengan cara sesingkat-singkatnya. Kalau tidak ada standarisasi bagaimana? Jadi, secara struktural, bukan secara individual ada keharusan. Saya tidak bisa menyalahkan si A atau si B; secara struktural sudah begitu.



**Bahren Umar Siregar, USU, Medan:** Ini hanya tanggapan, saya kira. Saya dapat memahami pendapat-pendapat Pak Ariel sebagai sosiolog, karena ada beberapa pandangan yang sebenarnya bertolak belakang dengan pandangan-pandangan linguistik. Jelas bahwa bahasa tidak seragam. Bahasa itu bhineka, memiliki ragam, namun dalam keragaman itu ada keteraturan. Jadi, tidak benar bahwa bahasa sewenang-wenang dari segi struktur. Kemudian sebagai informasi saya sampaikan bahwa pada tahun 1800-an Louis Carroll juga sudah menulis suatu karya yang hebat yang banyak dikagumi, yaitu *Alice in the Wonderland, looking through the glass*, saya lupa persis judulnya, tapi di dalamnya banyak yang disebut dengan plesetan-plesetan bahasa Inggris.

Kemudian yang terakhir, barangkali bahasa perlu dipandang melalui wawasan multidisiplin. Wawasan sosiologi atau psikologi sosial akan memberikan bantuan yang bermanfaat untuk menganalisis gejala-gejala bahasa seperti ini dan saya sudah mencoba melihatnya, dan saya menganggap gejala plesetan ini sama saja kasusnya dengan gejala-gejala bahasa lainnya, seperti pengalihan bahasa atau alih kode.

**Wayan Bawa, Universitas Udayana, Bali:** Judul makalah ini "Pelecehan dan Kesewenang-wenangan Berbahasa. Subjudul: Plesetan dalam Kajian Bahasa dan Politik di Indonesia. Saya ingin bertanya, yang mana yang dimaksud dengan Plesetan dalam kajian politik di Indonesia?

**Daniel Parera:** Tadi saya lihat bahwa hanya ada pelecehan dan kesewenang-wenangan dari bawah. Apakah tidak ada pelecehan dan kesewenang-wenangan dari pemerintah ke bawah, ke rakyat? Itu yang tidak dibahas. Apakah pemerintah tidak pernah melecehkan rakyat lewat bahasa?

**Faturachman, IKIP Semarang:** Saya tertarik dengan makalah Anda, tapi saya tidak tahu apakah Anda berbicara serius atau plesetan. Sebagaimana yang Anda kemukakan pada halaman 15, pada paragraf ke-2, Anda mengatakan bahwa pendidikan bahasa di masyarakat kita secara menyeluruh cenderung mengasingkan kita dari gejolak masyarakat sendiri. Apakah ini suatu plesetan, atau pernyataan yang serius? Mohon penjelasan.

**Ibu Yoce:** Seperti telah kita ketahui bahwa bahasa bisa dijadikan sebagai perjuangan terhadap kemajuan bangsa atau perjuangan terhadap kondisi sosial yang tidak beres. Sekarang kita bicara mengenai masalah plesetan yang digunakan oleh masyarakat, yang sebetulnya kalau kita cerna, sebagai respon dari

ketidakadilan, atau dari sikap stress, dan terjadilah plesetan-plesetan bahasa seperti itu. Seperti Bapak katakan tadi tentang mahasiswa yang menulis tentang plesetan-plesetan bahasa, itu mungkin terjadi karena ketidaksenangan terhadap kondisi sosial sekarang. Pertanyaan saya adalah: apakah kita tidak menganggap plesetan bahasa ini secara ilmu saja? Misalnya Pak Harmoko, menteri penerangan kita, mungkin dia mengatakan bahasa dengan kata-kata yang salah, misalnya menyebutkan *empat* menjadi *ampat*, *enam* menjadi *anam*. Apakah itu salah atau tidak? Apakah itu juga disebut pelecehan bahasa? Misalnya, kalau kita menanggapi bahasa Bapak kita sebagai orang yang terpenting di Indonesia, menggunakan *-ken*, apakah dia juga tidak bisa menyadarkan dirinya untuk berbahasa yang baik supaya itu tidak dianggap pelecehan?

**Jawab (rangkuman untuk kelima penanya di atas):** Saya berterima kasih untuk semua tanggapan yang telah diberikan. Semuanya saya catat dan bila ada kesempatan saya akan merevisi makalah saya ini. Sebagai ungkapan terima kasih juga, saya akan memberikan tanggapan balik pada beberapa butir pokok pikiran yang diajukan.

Yang pertama adalah, yang saya maksud dengan keuniversalan dari plesetan adalah begini: bahwa plesetan itu pada hakikatnya memanfaatkan kodrat bahasa yang bersifat arbitrer. Saya gunakan kata *sewenang-wenang*, boleh juga *sembarangan*, karena kebetulan dalam bahasa Inggris, *arbitrary* artinya 'sewenang-wenang.' Misalnya, "Arief Budiman dipecat secara arbitrer," artinya secara sewenang-wenang.

Pengertian keuniversalan plesetan itu begini: Kalau plesetan itu ternyata merupakan praktek berbahasa yang memanfaatkan bahwa semua tanda bisa diartikan ini atau itu, bisa dikaitkan dengan yang bukan-bukan, sebetulnya dia tidaklah aneh, karena yang namanya bahasa resmi pun begitu. Jadi kalau saya bilang bahwa plesetan ada di mana-mana, bukan berarti bahwa di Irian ada sejenis yang lucu-lucu.

Bahasa yang saya pakai sekarang ini, yang saya pakai untuk menjawab sekarang ini, adalah bahasa yang dirangkai dengan sejumlah tanda yang digabung-gabungkan secara sewenang-wenang juga. Cuma bedanya, ini lazim, sedangkan yang lain kurang lazim. Yang kurang lazim jadi aneh. Jadi yang saya maksudkan dengan keuniversalan plesetan bukanlah bahwa sejenis kenakalan ini ada di mana-mana. Tidak. Itulah yang saya maksud. Maaf, kalau tadi saya kurang jelas menjelaskannya.

Benar seperti yang dikatakan Pak Bahren, yaitu bahwa dalam lingkungan linguistik dihargai keanekaragaman. Hanya yang ingin saya katakan,

Untuk menjawab Pak Sudaryanto, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, mengenai pandai atau bodohnya seseorang saya tidak sependapat dengan Pak Sudaryanto. Hal itu tidak ditentukan oleh berapa tahun seseorang bersekolah atau meneliti. Saya yakin banyak sekali maling, pelacur, atau penganggur yang tidak pernah sekolah atau mengadakan penelitian ilmiah. Namun tidak dalam semua hal mereka lebih bodoh daripada para guru besar di universitas. Begitu pula dalam bobot kebenaran pendapat yang dinyatakan seseorang. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan tebal atau tipisnya buku yang ditulis seseorang. Kebenaran juga tidak menjadi monopoli orang-orang dari suatu ras atau bangsa tertentu seperti contoh-contoh yang disebutkan Pak Sudaryanto. Orang-orang dalam sidang PELLBA ini belum tentu kalah dengan nama-nama yang disebutkan Pak Sudaryanto.

Kedua, mengenai sanggahan terhadap pandangan Saussure. Justru sebagian besar uraian saya menunjukkan bahwa sepanjang abad ini berbagai masyarakat modern menyangkal pandangan Saussure. Secara panjang lebar makalah saya membahas tentang bagaimana logika ekonomi dan teknokratis menerjang secara mengebu-gebu kebijaksanaan Saussure. Bukan berarti saya sepenuhnya setuju dengan Saussure dan ingin membelanya dari serangan pihak lain. Dalam makalah saya, juga sudah saya jelaskan posisi Bakhtin yang mempunyai pandangan agak lain dari Saussure tentang ke-acak-an watak bahasa. Maka dengan segala rendah hati, saya persilakan Pak Sudaryanto membaca makalah saya yang jauh dari sempurna, bila berminat mempersoalkan masalah-masalah di atas.

Sejumlah pertanyaan yang lain, seperti dari Ibu Susi, dan Pak Oktavianus, tentang jenis plesetan, saya kira saya agak malu-malu kucing untuk menjawabnya. Kalau saya menjawab: "Kategori ini, Bu," ini berarti saya sewenang-wenang. Dari mana saya bisa bicara seperti itu. Saya cuma memberikan cara memandang sejumlah masalah, dan cara itu sewenang-wenang. Syukur-syukur Anda bisa memandangnya dengan cara lain atau mempertimbangkan cara saya. Itu saja cukup buat saya. Tapi kalau Anda minta kebenaran mahatinggi dari saya, saya tidak punya. Jadi plesetan ya bisa digolongkan bahasa yang non-formal. Kemudian yang dicontohkan tadi (Ada kucing kena halilintar, *Eveready*), apakah itu plesetan? Boleh juga. Persoalan kategori jangan terlalu diprioritaskan atau dimutlakkan.

Yang penting dari Ibu Yudi adalah mengenai konteks dan pemicu. Saya mencoba mengatakan bahwa ada dua hal. Yang pertama, secara abstrak dan prinsip, plesetan seperti halnya lelucon, hanya akan berhasil apabila ada tiga hal. Pertama, ada kelaziman. Kalau *toilet*, artinya ini. Lazim. Kalau orkestra,

artinya ini. Juga lazim. Lalu ada penyelewengan sebagian dari yang lazim itu. Yang ketiga ada kemampuan pihak yang menerima kesan itu, mengenali dan menghargai bahwa itu plesetan. Itu secara prinsip.

Kalau ditanyakan dalam konteks yang empirik historis, sekarang mengapa plesetan berkembang biak secara hebat, maka menurut saya ada banyak sekali jawaban yang bisa diberikan dan semuanya serba spekulatif. Saya kira kita perlu lebih serius di forum yang lain membahas hal ini, tetapi kalau saya boleh lontarkan sedikit saja, percikan-percikan atau fragmen dari kata orang. Misalnya, seperti saya katakan ada semacam kemacetan saluran udara ventilasi politik kita ini pada saluran-saluran yang resmi: DPR, pers, forum akademik, seminar dibubarkan, LSM dikejar-kejar, demonstran dipenjara, stiker ditempel. Jadi, akhirnya, ya sudah di kamar di dinding-dinding, di buku tulis bikin plesetan. Kalau mahasiswa lagi kuliah dan dosennya membosankan, maka buku kuliahnya isinya plesetan semuanya. Mereka tidak mendengarkan kuliah, tetapi bikin plesetan. Itu yang pertama.

Yang kedua, menurut saya, zaman ini ditandai oleh kejenuhan orang, kecugraan orang, pada apa yang dimuliakan pada tahun '60 sampai awal '80, yaitu pada teknologi, *progress*, pembangunan. Orang sudah mulai sinis, orang sudah mulai curiga. Menurut saya, orang sudah cukup deras mempercayai dan menghargai apa yang namanya agama, etika, bahasa, sastra, dsb. Tanda-tandanya banyak sekali. Ini konteks sejarahnya. Ini kebetulan agak mirip dengan rekan kita yang bernama John Nasbitt. Kebetulan dia juga bilang begitu. Yang dulu terlalu diunggul-unggulkan -- teknologi, rasionalitas, matematika, ilmu ekonomi -- sekarang mulai dicurigai, mulai diejek-ejek.

**Anton Moeliono (moderator):** Bagaimana hubungan sindiran yang ada dalam begitu banyak bahasa Nusantara dengan plesetan? Kalau kita tidak apriori menyatakan bahwa ini gejala semesta, tetapi toh nyata bahwa di berbagai bahasa daerah sindiran berperan sekali, bermain dengan bahasa. Ada satu gejala bahasa lain yang tidak dapat saya kaitkan dengan ketiga kategori itu, pada hemat saya pemakai bahasa Indonesia dewasa ini menyalurkan entah yang namanya frustrasi, atau ketakwasan atau kejenuhan, jika setiap kali dalam pertemuan bahasa dipersoalkan lafal akhiran *-kan*. Pak, apakah akhiran *-ken* harus dibiarkan, diberi toleransi? Apakah lafal bakunya *semangkin* atau *semakin*? Pada hemat saya masalahnya bukan pada akhiran *-ken*, bukan pula pada *semangkin*, tetapi lebih pada siapa pemakainya. Jadi, pemakaian bahasa itu menunjukkan bahwa bahasa itu dapat dipakai untuk mengungkapkan dan untuk menyamakan.

masyarakat ini tidak sama dengan forum pertemuan linguistik. Kalau di forum linguistik, Anda berbicara begitu, semuanya mudah setuju. Tapi kalau Anda sudah keluar dari masyarakat, Anda tidak bisa lihat itu lagi. Ada sejumlah struktur dan kekuasaan yang memaksa-maksa Anda dan Anda jangan mencoba-coba berdebat. Anda akan ditampar atau bahkan lebih serius lagi. Kalau tidak percaya, cobalah buktikan. Dunia ini celakanya bukan forum linguistik. Ada banyak yang tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh majemuk, tidak boleh berbeda. Nah, di sinilah persoalan bahasa diappropriasikan.

Kemudian, Pak Daniel tadi menyinggung mengenai bahasa dari atas dan dari bawah. Dari atas maupun dari bawah, bahasa pada hakikatnya adalah suatu praktek hubungan sosial yang memungkinkan berbagai macam bentuk makna, yang sulit sekali dipastikan atau distabilkan. Selalu dinamis, selalu mengandung kemungkinan terpleset, sengaja ataupun tidak sengaja. Jangankan para pelawak, dengan orang yang kita nikahi selama lebih dari 20 tahun saja masih bisa salah paham, kok. Karena apa? Karena satu tanda bisa mempunyai lebih dari satu makna. Konteksnya berubah-ubah terus.

Bedanya, yang dari atas berasumsi atau berpretensi bahwa yang dinyatakan itu tidak sewenang-wenang, itu normal, objektif, dan standar. Yang objektif itu ilmiah, itulah yang benar, itulah yang resmi. Yang dari bawah sadar bahwa dia tidak resmi. Dia sudah berharap akan ditertawakan. Yang dikerjakan sama, tapi statusnya berbeda, dampaknya jadi berbeda pula. Jadi, bukannya yang atas tidak melakukan pelecehan dan kesewenang-wenangan. Kita semua melakukan itu, dalam pengertian bahwa kita tidak bisa mengatakan kalau meja disebut meja, itu ada hukumnya, karena kita samaunya. Yang mau siapa? Kalau yang diajak bicara itu mau, ya tidak apa-apa. Tapi ada sejumlah masalah di luar forum linguistik di mana Anda tidak ditanya, "Mau tidak kalau disebut harga-harga disesuaikan?" Kan Anda tidak ditanya dulu, diterima saja. Kalau saya sebut, ini Indonesia, ini Pancasila, yang ini tidak Pancasila, janganlah berbantah lagi. Kalau Anda disebut tidak bersih lingkungan, ya sudah diterima saja. Jangan berbantah. Kalau Anda berbantah, Anda komunis. Semuanya ini terus berlangsung, seringkali tanpa intervensi dari para ahli bahasa.

Itulah yang saya maksudkan menjawab pertanyaan Pak Faturochman, betapa yang diajarkan pada kelas-kelas bahasa itu agak terasing dari masyarakatnya. Bangsa Indonesia ini bergulat tidak cuma cari beras, Pak. Tapi kadang-kadang pikirannya *butek* karena kerancuan orang ngomong karena berkuasa saja. Menurut saya, para ahli bahasa bisa membantu bangsa kita *empowering*, memberikan daya, mencerna pernyataan-pernyataan yang berkuasa itu. Itu kadang-kadang tidak bisa diberikan para ahli ilmu sosial, para ahli ilmu statistik

yang membuat tabel-tabel. Yang bisa adalah para Bapak/Ibu di sini. Itulah harapan saya. Tampil di ruang pengadilan untuk menjelaskan apa artinya menghina dan tidak menghina Presiden, dan apa artinya menghina dan tidak menghina rakyat. Itulah. Itu seharusnya ahli bahasa yang ngomong, bukan hanya jaksa yang ngomong. Saya pernah berhadapan dengan orang yang menginterogasi di kantor polisi, saya pernah mengalami hal itu. Saya merasa kasihan sekali bagaimana bapak-bapak yang sersan itu menyusun kalimatnya setengah mati. *Mbok* dibantulah, tolong, dengan baik dan benar, tentunya, bukan dengan ukuran formal, tapi ukuran etika, filsafat, Pancasila, dsb.

Saya harap uraian berpanjang-lebar di atas sudah sekaligus menjawab Pak Wayan. Kalau belum, saya garis bawah lagi bahwa kalau saya bicara tentang pelecehan bahasa, seperti yang ditanyakan oleh Ibu Yoco juga, yang saya maksud dengan bahasa itu, kaya dengan kemungkinan dan makna. Bahasa menurut saya adalah senjata dan modal yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan uang, senjata, pisau, tetapi bahasa. Itu yang membedakan kita dari dari kerbau, dari cacing, dari pohon, dari kursi.

Tapi mengapa seringkali bahasa diperlakukan pertama-tama menjadi alat untuk komunikasi untuk pembangunan dalam rangka menyongsong PJPT II? Bahasa itu macam-macam, tidak cuma itu saja. Itulah yang saya katakan pelecehan terhadap bahasa, menghina bahasa. Pelecehan bahasa, menurut saya, bukannya kecelakaan, bukannya tidak sengaja atau kebetulan saja. Hal itu terpadu dengan pelecehan kekuasaan. Jadi klop, karena ada yang diuntungkan, ada kepentingan yang dikejar. Tapi kepentingan itu, menurut saya, juga bukan karena kejahatan satu atau dua orang.

Sekali lagi sebagai penutup, kita hidup dalam suatu sejarah, dengan berbagai macam tembok-tembok dan gelombang struktural yang sulit diganti. Siapa pun yang menjadi Presiden, siapa pun yang menjadi menteri, dalam konteks Indonesia global seperti ini, pilihannya tidak banyak. Tapi bukan berarti kita menyerah dan ikut arus saja. Dalam keterkaitan itulah kita melihat ada semacam ketegangan antara kekuatan struktur, tetapi juga kemampuan kreatif manusia sebagai insan untuk mencoba menawar. Jadi, tidak memahlawankan manusia, tapi tidak secara sombong manusia bisa berbuat apa saja, karena ada struktur. Juga tidak fatalis, menerima saja karena strukturnya begini ya sudah. Saya kira hanya itu yang bisa saya sumbangkan, semoga tidak terlalu mengecewakan, dan maaf apabila ada yang kurang berkenan.



**Agus Saryadi, Universitas Terbuka:** Dalam surat kabar seringkali kita ketemu kata atau istilah antara lain:

- Harga BBM akan *disesuaikan*: untuk mengganti kata *dinaikkan*,
- *Kolusi* (kongkalikong) yang diplesetkan menjadi *korupsi*,
- *Desa Tertinggal* (pada Inpres Desa Tertinggal) sebagai pengganti istilah *desa miskin*,
- Seorang demonstran *diamankan*, untuk mengganti kata *ditahan*,

Dari beberapa kata atau istilah itu sebagian pengamat mengatakan itu sebagai eufemisme (penghalus), sebagian lain menyebutnya sebagai plesetan. Tetapi mengingat ungkapan atau istilah itu ada makna yang diplesetkan (bahkan bertolak belakang, misalnya *diamankan* artinya 'yang bersangkutan dalam keadaan aman atau baik-baik,' ternyata tidak aman karena ditahan).

Tampaknya di situ ada gejala hipokrisi (pemunafikan), sehingga masyarakat menjadi bingung, seperti dibodohi. Jadi, bukankah ini tidak sekadar plesetan?

**Hamzah A. Machmoed:** Kalau plesetan yang Anda bicarakan ini mengandung ciri pe-nyimpangan pikiran wajar dengan unsur tipu daya emosional yang kadang-kadang memberikan penekanan pada implikasi perilaku, apakah *spooneerism* dapat dikategorikan sebagai plesetan?

Bersetujukah Anda dengan saya, bila budaya mleset ini dipicu pula oleh lingkungan yang serba paternalistik? Adalah suatu hal yang hampir tidak mungkin bila hubungan vertikal ini kita terobos dengan kritikan langsung selain dengan mleset-mleset. Mohon tanggapan.

**Laksmi Parikesit, Independen, Bandung:** Pernahkah Bapak membaca "Pojok Rehat" di Harian *Republika*, yang relatif pendek dan mantap/menohok? Menurut Anda, jenis plesetan yang mana? (walaupun sewenang-wenang).

Sebenarnya, jika jeli, rubrik "Resonansi" juga mengandung plesetan yang tajam. Pemicu dan konteks yang bagaimana yang harus diperhitungkan penulisnya agar "penanda" yang dikirim dapat sampai pada pembaca (notabene: pengetahuannya sangat variatif)?

**Kun Herrini, LIA, Jakarta:** Pernah saya temui pada kelompok tertentu (waktu itu kelompok orang tua, dan sekarang justru muncul dari anak saya), adanya kecenderungan untuk membuat "pembicaraan" mereka eksklusif dan tidak diketahui orang lain. Misalnya:

aku : agaruku  
mau : magaruu  
pergi : pegerigi.

1. Apakah ini yang tadi disebut "kesewenangan"? Apakah ini juga yang mendasari terciptanya bahasa "prokem" yang banyak muncul pada, teristimewa, remaja (ibu kota?) dan frekuensi perubahannya sangat tinggi? Lalu apakah hal ini ada hubungannya (paling tidak gejalanya sama) dengan penciptaan *pass-word* dalam dunia komputer?
2. Dari buku *Theory of Language*, karangan ....? ada tertulis bahwa salah satu properti bahasa adalah "No language is exclusive". Apakah kasus di atas bisa dihubungkan dengan teori ini?

**Ngusman Abdul Manaf, IKIP Padang :** Sapir dan Whorf menyatakan bahwa bahasa menentukan cara berpikir seseorang. Saat ini ada kecenderungan dari pihak tertentu untuk mengubah istilah yang sudah ada menjadi istilah baru, misalnya *pelacur* menjadi *wanita tuna susila*, *ditangkap* menjadi *diamankan*, *kenaikan harga* menjadi *penyesuaian harga*, *hutang dari luar negeri* diganti menjadi *bantuan luar negeri*. Apakah fenomena tersebut merupakan plesetan bahasa? Bagaimana penjelasan fenomena tersebut dari sudut pandang linguistik, antropologi, dan politik?

**Rinah Kartini, SMPK VI, Jakarta:**

- 1). Plesetan tidak bisa terlepas dari campur kode, misalnya "Pra one two lend" (perawan tulen). Jadi, di sini terjadi pencampuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bagaimana menurut Bapak?
- 2). Menurut Bapak, kapan munculnya dan dari golongan mana plesetan muncul? Istilah "plesetan" muncul atau populer sekitar tahun 1990-an, misalnya istilah "ketoprak plesetan" yang populer di Jawa. Menurut saya, "plesetan" muncul di kalangan remaja pada tahun 1986 melalui serial *Lupus* di mana banyak ditemukan contoh-contoh seperti: *Lucu cap Nona*, *Lebih baik terlambat dari pada tidak terlambat*.

Saya melihat ini sebagai gejala penunjukan diri para remaja, yang ingin menunjukkan identitas dirinya yang tidak ingin terikat pada aturan-aturan yang sudah ada, sehingga mereka sengaja mengacaukan bahasa.

**Ikhsanudin, Universitas Tanjungpura, Pontianak:** Saya berpendapat bahwa plesetan bukan hanya dipengaruhi oleh ketidakberdayaan sosial tetapi ada faktor yang lebih berpengaruh dari ketidakberdayaan itu, yaitu kesewenangan manusia dalam arti ingin berlaku "sakkarepe dewe." Lebih jauh dari itu adalah kebandelan/kekeras-kepalaan dan rasa ego yang terlalu tinggi. Artinya, orang membuat plesetan, di samping karena ketidakberdayaannya menembus "dinding" kekuasaan di luar dirinya, juga karena ia ingin memaksakan kehendaknya yang egois kepada pihak lain. Satu contoh tandingan terhadap contoh-contoh Anda adalah mulut LSM-LSM yang "sariawan" melihat penyiksaan dan perusuhan orang-orang Timor Timur terhadap pendatang atau terhadap orang-orang non-Katolik. Padahal, perusuhan tersebut jelas-jelas melanggar HAM yang selalu diperjuangkan oleh LSM-LSM yang biasanya "vokal" di Indonesia. Contoh tersebut menurut saya dapat dijadikan rujukan dalam mengemukakan bahwa kalau LSM mau membuat aksi (yang biasanya berplesetan) biasa saja, tetapi karena kehendak mereka tidak ke arah itu maka mereka tidak "mleset-mleset".

**Djoemingan K.P., PPPG Bahasa, Jakarta:** Menarik sekali pernyataan Bapak bahwa bahasa Krama Inggil dalam bahasa Jawa mungkin suatu gejala plesetan. Mohon penjelasan dengan contoh-contohnya.

**Jawab (rangkuman untuk kedelapan penanya di atas):** Bahasa yang dipakai penguasa kadang-kadang memang terasa menghina masyarakat. Pernyataan-pernyataan mereka mengandaikan bahwa masyarakat umum itu bodoh. Tetapi ini tidak berarti masyarakat menjadi bingung, seperti yang ditanyakan Bapak Agus. Tidak juga membuat masyarakat menjadi bodoh. Pernyataan-pernyataan yang merendahkan masyarakat seperti itu tidak termasuk dalam plesetan seperti yang kita bahas di sini. Plesetan merupakan kegiatan berbahasa yang cerdas dan kreatif, dan ditujukan kepada mereka yang cukup cerdas untuk memahaminya.

Plesetan dengan demikian bukanlah suatu tipu-daya, seperti yang ditanyakan Bapak Hamzah. Plesetan tidak menipu atau mengecohkan pihak yang diajak bicara. Plesetan bisa terdapat dalam berbagai masyarakat dalam berbagai versi, corak, nama, dan status. Plesetan yang sedang marak di Indonesia pada masa ini hanyalah salah satu ke mungkinannya, dengan alasan-alasan dan implikasi sosial historis yang kontekstual pada masa ini.

Saya pernah membaca yang ditanyakan Ibu Laksmi, tetapi tidak ingat secara persis apa yang saya baca. Untuk mengkategorikan tulisan itu termasuk

jenis plesetan macam apa, tentu saja harus dilihat kasus-per-kasus. Lagi pula, kategorisasi bukanlah masalah yang terlalu penting dalam dirinya sendiri. Kategorisasi hanyalah sekadar cara atau alat yang kita bikin untuk memudahkan pembahasan. Saya agak heran pertanyaan mengenai "jenis apakah plesetan ini atau itu" sangat populer dalam forum ini.

Soal prokem sudah saya bahas dalam makalah saya. Silakan Sdr. Kun Herrini menengok kembali makalah saya. Soal maksud pernyataan "*no language is exclusive*", saya hanya bisa menduga-duga. Barangkali maksudnya tidak ada bahasa dan makna yang dibikin seseorang secara individual semau-maunya. Tindakan berbahasa selalu melibatkan orang lain yang diajak berbicara. Orang lain itu tidak dapat semau-maunya dipaksa atau ditipu dalam memaknai kata atau dunia. Silakan tengok kembali pernyataan Bakhtin yang saya kutip dalam makalah saya. Pada intinya setiap bahasa sekaligus inklusif dan eksklusif.

Pertanyaan Bapak Ngusman sangat bagus. Jawaban saya tak bisa sebagai pertanyaan itu. Setiap penggunaan bahasa oleh siapa pun kapan pun selalu melibatkan perilaku "mengubah istilah yang sudah ada menjadi istilah baru." Atau mengubah makna yang sudah ada menjadi makna baru. Singkatnya, rekonstruksi, renovasi, atau rekreasi. Ini berlaku universal. Bukan kebiasaan pejabat Orde Baru saja. Plesetan juga melakukan proses serupa itu, tentunya dengan beberapa ciri tambahan seperti yang saya uraikan dalam makalah. Sebaliknya, tidak semua rekonstruksi kebahasaan termasuk dalam apa yang hari ini kita bahas sebagai plesetan.

Kita tak perlu penjelasan serba sulit dan muluk dari para ahli linguistik, antropologi, atau politik untuk membahas pernyataan-pernyataan para penguasa itu. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak bodoh untuk menyadari bahwa contoh-contoh yang Bapak sebutkan itu jelas-jelas dilakukan sebagai kesewenangan politik kebahasaan. Mirip dengan sub-judul tulisan saya.

Menjawab pertanyaan Bu Rinah, saya berpendapat bahwa campur kode bisa menjadi salah satu unsur atau siasat pembentukan plesetan. Salah satu siasat yang populer, karena campur-aduk selalu mengandung enersi destabilisator. Tetapi harap diingat campur kode itu bukanlah satu-satunya unsur atau siasat. Silakan tengok kembali contoh-contoh dalam makalah saya.

Biarpun susah, secara teori kita dapat melacak sejarah "populer"-nya istilah plesetan. Tetapi kita tidak dapat melacak asal-usul praktek berplesetan itu sendiri, karena ini universal. Kita hanya bisa menduga bahwa plesetan lahir bersama dengan lahirnya bahasa oleh makhluk yang bernama manusia. Bukan

monopoli remaja yang ingin menegaskan identitas diri lewat pemberontakan belaka.

Terima kasih untuk masukan dari Bapak Ikhsanudin. Pertanyaan terakhir datang dari Bapak Djoemingan. Apa yang saya sebutkan tentang bahasa Jawa Krama sebagai sebuah rekreasi, renovasi, rekonstruksi bukanlah penemuan saya. Ini saya pelajari dari orang-orang lain, khususnya G. Moedjanto dari Yogyakarta dan Ben Anderson dari Amerika.

Walau tidak dalam semua hal mereka mempunyai pandangan yang sama, mereka bersepakat bahwa bahasa Jawa Krama merupakan hasil proyek politik para penguasa Jawa di sekitar abad ke-17 atau ke-18. Caranya ialah dengan mengubah-ubah bahasa Jawa yang sudah ada pada waktu itu. Tujuannya untuk mendongkrak gengsi pada saat kekuasaan riel mereka sedang babak-belur karena dihantam Belanda. Menurut Pak Moedjanto, Jawa Krama ini sengaja dibikin rumit untuk membedakan jati diri para penguasa Jawa dari rakyat jelata yang tidak berbahasa Jawa Krama. Apakah dan sejauh mana pendapat semacam ini



# PELLBA 9

Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya:  
Kesembilan

**linguistik lapangan  
bahasa dan politik  
evaluasi kamus**

Diterbitkan dalam kerja sama dengan  
LEMBAGA BAHASA UNIKA ATMA JAYA, JAKARTA 1996

**Penyunting  
Bambang Kaswanti Purwo**



PENERBIT KANISIUS

PELLBA 9

Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya:  
Kesembilan

027450

© Kanisius 1996

Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI)  
Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 588783, Teleks 25243, Fax (0274) 563349  
Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011

Cetakan pertama 1996

ISBN 979-497-819-1

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

## DAFTAR ISI

Penyaji Makalah.....	x
Kata Pengantar .....	xii
<b>Metode Penelitian Linguistik Lapangan: Penggunaan dan Tantangannya</b> .....	1
<i>Richard Nivens</i>	
Pendahuluan .....	1
1. Tujuan.....	1
2. Objek Penelitian .....	2
3. Metode Pengumpulan Data .....	4
Sumber data: pemilihan lokasi .....	5
Sumber data: pemilihan orang-orangnya .....	8
Belajar berbicara dalam bahasa itu.....	11
Memahami keterbatasan diri kita .....	14
Belajar bagaimana mengajukan pertanyaan.....	16
Peralatan dan bahan.....	17
Memperoleh data bahasa yang alamiah .....	17
Berhubungan dengan masyarakat.....	18
4. Metode-metode Pengaturan Data .....	20
Metode tradisional.....	21
Menggunakan komputer.....	21
5. Analisis.....	23
Persiapan .....	23
Bahasa-bahasa yang saling berhubungan dan sifat-sifat universal ...	24
Penarikan contoh dan statistik.....	27
Analisis bahasa: sebuah proses yang berkesinambungan .....	28
Sumber Rujukan Pustaka .....	29
Tanya Jawab.....	31
<b>Echa: Perkembangan Bahasa Anak Indonesia: Dua Belas Bulan yang Pertama</b> .....	37
<i>Soenjono Dardjowidjojo</i>	